

**LAPORAN PERKEMBANGAN  
PEREKONOMIAN DAERAH (LPPD)  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Triwulan II - 2006**

**Kantor Bank Indonesia  
Medan**

LAPORAN PERKEMBANGAN  
PEREKONOMIAN DAERAH (LPPD)  
PROVINSI SUMATERA UTARA

---

TRIWULAN II-2006



KANTOR BANK INDONESIA MEDAN  
2006

### Visi Bank Indonesia:

"Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil".

### Misi Bank Indonesia:

"Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan".

### Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia:

"Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaan".

### Visi Kantor Bank Indonesia Medan:

"Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai *economic intelligence* dan unit penelitian".

### Misi Kantor Bank Indonesia Medan:

"Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait".

### Kalender Publikasi

#### Periode Publikasi

LPPD Triwulan I  
LPPD Triwulan II  
LPPD Triwulan III  
LPPD Triwulan IV

#### Publikasi

Pertengahan Mei  
Pertengahan Agustus  
Pertengahan November  
Pertengahan Januari

---

### Penerbit:

Seksi Kajian Ekonomi dan Moneter

Bidang Ekonomi dan Moneter

Kantor Bank Indonesia Medan

Jl. Balai Kota No.4

MEDAN, 20111 Indonesia

Telp : 061-4150500 psw. 1729

Fax : 061-4152777

Homepage : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Email : [yosamartha@bi.go.id](mailto:yosamartha@bi.go.id)  
[dsyakobi@bi.go.id](mailto:dsyakobi@bi.go.id)

---

## KATA PENGANTAR



Meningkatnya tekanan terhadap perekonomian nasional yang ditandai dengan pelemahan rupiah dan penyesuaian portofolio asing sebagai respon terhadap kemungkinan berlanjutnya kebijakan moneter ketat global tampaknya tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap inflasi Sumut. Namun demikian, pada triwulan II-2006, perekonomian belum menunjukkan peningkatan kegiatan yang mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan tingkat harga secara umum di Sumut hingga posisi Juni terus bergerak membaik yang tercermin pada inflasi yang cukup rendah. Kekhawatiran tekanan inflasi yang didorong oleh kenaikan komoditi *administered price* tidak terjadi pada triwulan I pasca pembatalan rencana pemerintah untuk menaikkan harga tarif dasar listrik dan gas. Namun demikian, sensitifitas tingkat harga kembali meningkat, khususnya setelah pemerintah menaikkan harga BBM untuk industri pada April 2006. Dampak yang dirasakan memang tidak secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan harga komoditi terkait (*second round effect*), namun cukup mengganggu upaya pemulihan di sektor riil.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari cukup rendahnya pencapaian laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I dan bahkan kontraksi yang terjadi pada triwulan II. Catatan penting yang patut dicermati dalam upaya percepatan ekonomi ke depan adalah peran strategis realisasi anggaran yang tidak saja berfungsi sebagai stimulator perekonomian, namun juga merupakan penggerak pembangunan itu sendiri yang akan memberikan keyakinan kepada seluruh pelaku ekonomi untuk kembali beraktivitas. Acuan positif yang patut menjadi pijakan kita untuk tetap optimis adalah trend pertumbuhan tahunan yang mulai bergerak positif.

Demikianlah sekilas gambaran mengenai perkembangan perekonomian Sumatera Utara triwulan II serta prospeknya pada triwulan berikutnya yang uraiannya secara komprehensif tercakup dalam buku **Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2006**.

Medan, Agustus 2006  
BANK INDONESIA MEDAN

**Romeo Rissal**

Pemimpin

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar isi</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	vii
II. Inflasi .....	Vii
III. Ekonomi Sumatera Utara .....	Vii
IV. Perkembangan Perbankan .....	Viii
V. Prospek Ekonomi, Inflasi, dan Perbankan Sumut .....	ix
<b>BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	1
1.1. Sisi Produksi.....	1
1.2. Sisi Penggunaan.....	20
1.3. Sisi Pengeluaran .....	23
1.3.1 Konsumsi .....	23
<b>Boks-1 Survei Penjualan Eceran</b>	
1.3.2 Investasi .....	25
1.2.3 Perdagangan Internasional .....	29
<b>Boks-2 Kontribusi Sektor Informal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja</b>	
<b>Boks-3 Pembangunan Bandara Kuala Namu dan Dampaknya terhadap Ekonomi Sumatera Utara</b>	
<b>BAB II PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL</b>	31
2.1 Kondisi Umum.....	31
2.2 Inflasi Sumatera Utara .....	32
2.3 Disagregasi Inflasi Sumatera Utara .....	33
2.4 Inflasi Kelompok Barang .....	34
<b>Boks-4 Determinan Inflasi Sumatera Utara Semester I - 2006</b>	
<b>Boks-5 Survei Konsumen</b>	
<b>BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN, MONETER, DAN SISTEM PEMBAYARAN</b>	36
3.1 Perbankan Sumut .....	36
3.1.1 Perkembangan Bank Umum .....	36
3.1.2 Intermediasi Perbankan .....	37
3.1.3 Resiko Kredit .....	40
3.1.3.1 Resiko Pasar .....	42
3.1.3.1 Resiko Likuiditas .....	42
<b>Boks-6 Peningkatan Peran UMKM Sumut Triwulan II – 2006</b>	
<b>Boks-7 Tingginya Jumlah Kredit Bermasalah</b>	
3.2 Perkembangan Sistem Pembayaran.....	43
3.2.1 Transaksi BI-RTGS Perbankan di Sumatera Utara .....	43
3.2.2 Perkembangan Kliring .....	44
3.2.3 Perkembangan Pengedaran Uang (inflow/outflow) .....	46
3.2.4 Temuan Uang Palsu .....	48
3.2.5 Penyediaan Uang Layak Edar .....	49
3.2.6 Transaksi Jual Beli UKA pada PVA .....	49

**Boks-7 Sistem Kliring Nasional di Sumut**

<b>BAB IV PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH</b>	51
4.1 Prospek Ekonomi.....	51
4.2 Prospek Inflasi .....	52

**Boks-8 Rekomendasi Kebijakan**

## DAFTAR GRAFIK

1.1	Jumlah Wisman SUMUT Triwulan I 2005 – Triwulan II 2006 .....	16
1.2	Jumlah Wisman SUMUT Januari 2002 – Juni 2006 .....	17
1.3	Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Sumut .....	18
1.4	Rata-rata TPK Hotel Berbintang Sumut Menurut Klasifikasi Hotel .....	19
1.5	Ekspor Impor Sumut.....	29
1.6	Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Sumut .....	30
1.7	Perkembangan Volume Ekspor dan Impor Sumut .....	30
2.1	Perkembangan Inflasi Nasional dan Regional Sumut .....	31
2.2	Disagregasi Inflasi .....	33
2.3	Sumbangan Inflasi Inti, Volatile & Administered .....	34
3.1	Perkembangan Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan .....	37
3.2	Perkembangan Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi .....	39
3.3	Perkembangan LDR, Kredit dan DPK Bank Umum .....	40
3.4	Perkembangan Aliran Bersih BI RTGS .....	43
3.5	Perkembangan Transaksi Kliring Sumut .....	44
3.6	Perkembangan Penolakan Cek dan BG Kosong Sumut.....	46
3.7	Perkembangan Aliran Uang di Sumut .....	47
3.8	Komposisi Temuan Uang Palsu Trw. I-06 di Sumut .....	48
3.9	Perkembangan Transaksi PVA (non Bank) di Sumut.....	50
4.1	Ekspektasi Harga Survei Konsumen .....	53

1.1	Nilai PDRB SUMUT Menurut Lapangan Usaha.....	1
1.2	Laju Pertumbuhan PDRB SUMUT ADH Konstan 2000 .....	2
1.3	Laju Pertumbuhan Dan Struktur Sektor Pertanian.....	4
1.4	Peranan Kabupaten/Kota Terhadap NTB ADH Berlaku .....	5
1.5	Laju Pertumbuhan Dan Struktur Sektor Industri.....	8
1.6	Laju Pertumbuhan Dan Struktur Sektor Listrik, gas, dan Air Bersih.....	9
1.7	Laju Pertumbuhan Dan Struktur Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.....	10
1.8	Laju Pertumbuhan Dan Struktur Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.....	11
1.9	Laju Pertumbuhan Dan Struktur Sektor Keuangan dan Jasa.....	13
1.10	Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Jasa .....	14
1.11	<b>Nilai PDRB Sumatera Utara Menurut Komponen Penggunaan.....</b>	<b>20</b>
1.12	Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Sumatera Utara.....	21
1.13	Indeks Harga Hasil Sruvei Konsumen .....	24
1.14	Peringkat Realisasi PMDN dan PMA Sumut .....	27
1.15	Peringkat Persetujuan PMDN dan PMA Sumut .....	28
2.1	Inflasi Kelompok Barang Sumut Triwulanan.....	35
3.1	Perkembangan Indikator Utama Bank Umum Sumut .....	36
3.2	Perkembangan Kredit Menurut Jenis Penggunaan .....	37
3.3	Perkembangan Kredit Menurut Sektor Ekonomi.....	38
3.4	Perkembangan UMKM Bank Umum.....	39
3.5	Perkembangan NPL Kelompok Bank .....	41
3.6	Perkembangan NPL Sektor Ekonomi .....	41
3.7	Statistik Transaksi BI – RTGS .....	44
3.8	Statistik Perputara Kliring .....	45
3.9	Data Aliran Uang dan PTTB di Sumut .....	47
3.10	Temuan Uang Palsu yang Dilaporkan .....	48



- A. PDRB TRIWULANAN PROPINSI SUMUT ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2000
- B. PDRB TRIWULANAN PROPINSI SUMUT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
- C. PERTUMBUHAN PDRB TRIWULANAN PROPINSI SUMUT ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2000
- D. PERTUMBUHAN PDRB TRIWULANAN PROPINSI SUMUT ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
- E. STRUKTUR PDRB TRIWULANAN PROPINSI SUMUT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
- F. STRUKTUR PDRB TRIWULANAN PROPINSI SUMUT ATAS DASAR HARGA BERLAKU
- G. PDRB TRIWULANAN PROPINSI SUMUT MENURUT PENGGUNAAN
- H. INFLASI NASIONAL DAN REGIONAL

# BAB I

## PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2006

### 1.1 SISI PRODUKSI<sup>1</sup> (PDRB SEKTORAL)

#### A. Gambaran Umum

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II 2006 dibanding dengan triwulan sebelumnya yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, mengalami penurunan sebesar 1,37%, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,11%.

Tabel 1.1.  
Nilai PDRB Sumatera Utara Menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha  
Triwulan I - II Tahun 2006  
(Miliar Rupiah)

Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Triw I'06	Triw	Triw I'06	Triw II'06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	12.297,49	12.210,1	5.762,93	5.482,86
2. Pertambangan dan	801,28	778,52	301,77	303,22
3. Industri Pengolahan	10.085,67	9.782,10	6.158,37	6.081,09
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	472,18	463,27	217,37	208,70
5. Bangunan	1.580,25	1.579,76	1.138,63	1.130,25
6. Perdag, Hotel dan	7.390,76	7.257,22	4.866,01	4.800,10
7. Pengangkutan dan	3.068,88	2.946,88	1.530,63	1.494,93
8. Keuangan dan Jasa	1.961,01	2.073,18	1.152,12	1.209,70
9. Jasa-Jasa	3.078,31	3.344,01	1.885,96	1.986,77
<b>PDRB Sumatera Utara</b>	<b>40.735,8</b>	<b>40.435,</b>	<b>23.013,79</b>	<b>22.697,61</b>

Berdasarkan pengolahan dan penghitungan hasil pengamatan Survei Indikator Ekonomi Triwulanan Sumatera Utara serta berbagai data/indikator ekonomi yang ada, PDRB Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2000 triwulan II 2006 sebesar Rp22.697,61 miliar, sementara pada triwulan I 2006 sebesar Rp23.013,79 miliar. Berdasarkan harga berlaku, PDRB Sumatera Utara sebesar

<sup>1</sup> Hasil Survei Indikator Ekonomi Triwulanan Sumut, kerjasama Bank Indonesia Medan dan BPS-SU.

Rp40.435,07 miliar, atau menurun sebesar minus 0,74% dari triwulan sebelumnya sebesar Rp40.735,83 miliar.

Penurunan sebesar 1,37% pada triwulan II 2006 disebabkan oleh adanya penurunan di hampir semua sektor ekonomi. Penurunan terbesar terjadi di sektor pertanian, diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sementara penurunan yang terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan pada kisaran dibawah 2%. Dilain pihak sektor keuangan dan jasa perusahaan mengalami pertumbuhan positif diikuti oleh sektor jasa-jasa dan sektor pertambangan dan penggalan.

Tabel 1.2.  
Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Sumut Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha  
Triwulan I - II Tahun 2006  
(%)

Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw. II'06 Thd Trw.	Struktur	
	Trw I'06	Trw.II' 06		Trw I'06	Trw.II' 06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	-0,41	-4,86	2,85	30,19	30,20
2. Pertambangan dan	2,14	0,48	1,10	1,97	1,93
3. Industri Pengolahan	3,90	-1,26	2,37	24,76	24,19
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,87	-3,99	0,24	1,16	1,15
5. Bangunan	3,53	-0,74	-1,55	3,88	3,91
6. Perdagangan, Hotel dan	10,03	-1,35	10,71	18,14	17,95
7. Pengangkutan dan	5,77	-2,33	7,28	7,53	7,29
8. Keuangan dan Jasa	5,24	5,00	12,57	4,81	5,13
9. Jasa-Jasa	3,72	5,35	14,09	7,56	8,27
<b>PDRB Sumatera Utara</b>	<b>4,11</b>	<b>-1,37</b>	<b>5,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

PDRB triwulan II 2006 dibanding dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, mencerminkan perubahan yang tidak dipengaruhi oleh faktor musim. PDRB triwulan II 2006 dibandingkan dengan triwulan II 2005 secara total tumbuh sebesar 5,70%. Pertumbuhan ini didukung oleh hampir semua sektor ekonomi, kecuali sektor bangunan. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor jasa-jasa

sebesar 14,09%, diikuti sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 12,57%, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar sebesar 10,71%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,28%, sektor pertanian sebesar 2,85%, sektor industri pengolahan sebesar 2,37 %, sektor pertambangan dan penggalan sebesar 1,10% dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,24%. Sementara pertumbuhan negatif berasal dari sektor bangunan yang menurun sebesar 1,55%.

Peranan sektor ekonomi pada triwulan II 2006 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengalami perubahan akibat adanya kenaikan harga-harga hampir disemua komoditi ekonomi. Peranan terbesar masih berasal dari sektor pertanian, diikuti sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Demikian peranan terendah masih berasal dari sektor listrik, gas & air bersih.

Perbandingan peranan antar sektor ekonomi, menunjukkan bahwa lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara masih berasal dari sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Masing-masing sektor ini memberikan kontribusi sebesar 30,20% dan 24,19% terhadap total PDRB Sumatera Utara. Jika melihat struktur ekonomi pada triwulan I 2006 yang lalu, sektor pertanian memberikan peranan sebesar 30,19% dan sektor industri pengolahan sebesar 24,76%. Peranan nilai tambah sektor pertanian dalam pembentukan PDRB harga berlaku triwulan II 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,01 point.

Pembahasan lebih rinci perubahan dari setiap sektor dengan beberapa alasan yang signifikan menurut hasil survei indikator ekonomi dibahas dalam uraian berikut ini.

## **1. Sektor Pertanian**

Sektor pertanian selama ini mempunyai siklus pertumbuhan dengan pola hampir sama setiap triwulan dalam satu tahun. Akan tetapi akibat adanya pola perubahan iklim dan alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk hal lain menyebabkan adanya pergeseran pola produksi khususnya di sektor pertanian di tahun ini, sehingga akan mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada triwulan II 2006, dengan mengamati pola laju pertumbuhan di sub sektor pertanian terlihat adanya perbedaan bila dibandingkan dengan pola pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan I 2006 pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan mampu tumbuh positif, namun pada triwulan II 2006 sub sektor ini justru mengalami penurunan sebesar 12,08%. Hal yang sama juga terjadi di sub sektor kehutanan. Jika pada triwulan sebelumnya tumbuh hingga dua digit, pada triwulan ini minus 2,76%. Sub sektor perkebunan juga masih mengalami pertumbuhan minus yaitu sebesar 2,08%. Begitu juga halnya dengan sub sektor peternakan yang mengalami penurunan sebesar 4,13%.

Tabel 1.3.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor Pertanian  
Triwulan I - II Tahun 2006  
(%)

Sub Sektor Pertanian	Laju		Trw. II'06 Terhadap Trw.	Struktur	
	Trw I'06	Trw.II'06		Trw I'06	Trw.II'06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1 Tanaman Bahan	8,31	-12,08	-0,89	9,62	9,13
1.2 Perkebunan	-7,27	-2,08	6,93	10,28	10,8
1.3 Peternakan	-12,47	-4,13	-14,70	4,52	4,78
1.4 Kehutanan	18,49	-2,76	15,01	2,21	1,51
1.5 Perikanan	7,91	3,27	11,69	3,57	3,93
<b>Sektor Pertanian</b>	<b>-0,41</b>	<b>-4,86</b>	<b>2,85</b>	<b>30,1</b>	<b>30,2</b>

Hanya sub sektor perikanan yang tumbuh positif yaitu sebesar 3,27%, meskipun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sektor ini mengalami sedikit perlambatan. Secara total jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh minus 0,41%, maka pada triwulan II 2006 ini sektor pertanian kembali mengalami penurunan sebesar 4,86%.

### 1.1. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) meliputi kegiatan usaha komoditi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada triwulan II 2006 ini,

sub sektor ini mengalami pertumbuhan minus 12,08% setelah triwulan sebelumnya meningkat sebesar 8,31%.

Adanya penurunan nilai tambah sub sektor tabama pada triwulan II 2006 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, mengakibatkan penurunan kontribusi pada PDRB Sumatera Utara. Pada triwulan I 2006, sub sektor tabama memberikan peranan sebesar 9,62%, dan pada triwulan II 2006 memberikan peranan sebesar 6,13%. Walau mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB Sumatera Utara namun sub sektor tabama tetap menjadi penyumbang terbesar kedua pada sektor pertanian setelah sub sektor perkebunan.

Tabel 1.4.  
Peranan Kabupaten/Kota Terhadap NTB Atas Dasar Harga Berlaku Tanaman Padi dan Palawija  
Triwulan II – 2006 (%)

Kabupaten/Kota	Pad i	Jagun g	Kacang Kedela i	Kacan g Hijau	Kacan g Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Nias	4,64	0,15	0,00	0,52	1,51	7,18	3,98
2. Mandailing	3,83	1,22	19,14	4,05	9,15	1,00	2,93
3. Tapanuli	14,2	1,79	5,62	3,63	7,52	4,13	3,81
4. Tapanuli	1,47	0,58	3,60	1,91	4,42	0,11	1,14
5. Tapanuli Utara	12,2	1,99	0,25	0,02	5,63	11,52	3,35
6. Toba Samosir	12,1	3,12	0,00	6,94	6,76	8,85	9,58
7. Labuhan Batu	6,72	0,39	1,45	0,20	0,31	0,47	1,14
8. Asahan	10,5	3,13	2,17	0,98	0,90	2,71	5,28
9. Simalungun	14,9	31,02	0,78	7,37	17,95	21,10	14,48
10. Dairi	1,25	21,40	0,00	0,00	23,05	1,82	1,24
11. Karo	1,37	14,82	0,00	0,10	0,90	10,76	0,00
12. Deli Serdang	9,83	10,80	43,12	63,74	13,84	24,37	45,18
13. Langkat	4,84	8,51	23,23	8,09	4,91	2,44	2,19
14. Sibolga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Tanjung Balai	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
16. Pematang	0,47	0,29	0,06	0,00	0,75	0,32	2,68
17. Tebing Tinggi	0,27	0,04	0,17	0,05	0,04	0,11	0,60
18. Medan	0,03	0,25	0,06	0,67	1,45	2,41	1,45
19. Binjai	0,37	0,40	0,21	1,65	0,84	0,23	0,75
20. Pdg.	0,69	0,07	0,15	0,08	0,06	0,46	0,18
<b>Sumatera Utara</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,</b>

Sumbangan terbesar dalam pembentukan Nilai Tambah Bruto sub sektor tabama dan pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan pada sub sektor ini terutama berasal dari komoditi padi. Berdasarkan hasil panen padi selama triwulan II-2006 menurut kabupaten/kota di Sumut, produksi padi terbesar berasal dari Kabupaten Simalungun dengan peranan sebesar 14,90% dari total produksi Sumut. Sementara yang berada di urutan kedua berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 14,28%, diikuti oleh Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 12,28%, Kabupaten Toba Samosir sebesar 12,18%, Kabupaten Asahan sebesar 10,57%, Kabupaten Deli Serdang sebesar 9,83% dan Kabupaten Labuhan Batu sebesar 6,72%. Sementara daerah-daerah lainnya peranannya hanya berkisar dibawah 5%.

Untuk tanaman palawija lainnya seperti jagung, sumber produksi terbesar berasal dari Simalungun (31,02%), Dairi (21,40%), Karo (14,82%), Deli Serdang (10,80%) dan Langkat sebesar (8,51%). Sementara daerah lainnya berkisar di bawah 4%. Selengkapnya peranan kabupaten/kota di Sumatera Utara terhadap PDRB untuk tanaman padi dan palawija, dapat dilihat pada tabel 3.4. di atas.

### **1.2. Sub Sektor Perkebunan**

Sub sektor perkebunan yang meliputi tanaman keras seperti komoditi kelapa sawit, karet, coklat dan lainnya, pada triwulan II 2006 secara agregat menunjukkan penurunan produksi, yaitu sebesar minus 2,08%, setelah triwulan sebelumnya yang juga mengalami penurunan sebesar minus 7,27%. Namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, sub sektor perkebunan justru mengalami peningkatan sebesar 6,93%.

Jika dilihat dari peranan terhadap total PDRB Sumatera Utara, sub sektor ini merupakan penyumbang terbesar dari sektor pertanian, dimana peranannya pada triwulan II 2006 sebesar 10,85% sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 10,28%.

### **1.3. Sub Sektor Peternakan**

Sub sektor peternakan pada triwulan II 2006 mengalami penurunan sebesar 4,13%, setelah pada triwulan I 2006 juga mengalami penurunan sebesar 12,47%. Walau mengalami penurunan kinerja, kontribusi sub sektor ini terhadap total PDRB mengalami kenaikan. Pada triwulan II 2006 peranan sub sektor ini terhadap total

PDRB Sumatera Utara sebesar 4,78% dan pada triwulan I 2006 memberikan kontribusi sebesar 4,52%.

#### **1.4. Sub Sektor Kehutanan**

Kegiatan sub sektor kehutanan pada triwulan II 2006 mengalami penurunan sebesar minus 2,76% setelah pada triwulan sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 18,49%. Dampak dari penurunan sub sektor ini, mengakibatkan peranan sub sektor ini terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara mengalami sedikit penurunan dimana pada triwulan I 2006 sebesar 2,21% menjadi sebesar 1,51% pada triwulan II 2006.

#### **1.5. Sub Sektor Perikanan**

Hasil pengamatan yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa dari semua sub sektor yang ada hanya sub sektor perikanan yang mengalami pertumbuhan positif. Sub sektor ini tumbuh sebesar 3,27%, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 7,91%. Kontribusi sub sektor ini terhadap total PDRB pada triwulan II 2006 sebesar 3,93%, atau naik sebesar 0,36 point dari triwulan I 2006 yang sebesar 3,57%.

### **2. Sektor Pertambangan dan Penggalian**

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan II 2006 mengalami perlambatan, dimana hanya mampu tumbuh sebesar 0,48% dari triwulan sebelumnya. Perlambatan yang terjadi di sektor ini disebabkan karena adanya penurunan kinerja pada kegiatan sub sektor penggalian yaitu sebesar minus 2,26%, sedangkan kondisi yang berbeda terjadi di sub sektor pertambangan migas yang justru mengalami peningkatan sebesar 3,95% dari triwulan sebelumnya.

### **3. Sektor Industri Pengolahan**

Sektor ini meliputi sub sektor industri migas dan industri non migas, dimana industri non migas merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian setelah sektor pertanian di Sumatera Utara.

Kegiatan industri pengolahan migas di Sumatera Utara setiap triwulannya selalu berfluktuasi, adanya kecenderungan berfluktuasinya produksi pertambangan



Migas di Sumatera Utara mempengaruhi pertumbuhan triwulanan pada sub sektor industri migas ini. Pada triwulan II 2006 industri pengilangan migas mengalami penurunan sebesar 1,31%. Hal ini diikuti dengan menurunnya peranan sub sektor ini terhadap total PDRB yang mana pada triwulan I 2006 memberikan sumbangan sebesar 0,26%, namun pada triwulan II 2006 subsektor ini hanya mampu memberikan sumbangan sebesar 0,24%, atau mengalami penurunan sebesar 0,02 point.

Tabel 1.5.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Industri Triwulan I - II Tahun 2006 (%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw. II'06 Terhadap p	Struktur	
	Trw. I'06	Trw. II'06		Trw. I'06	Trw. II'06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1. Industri Migas	0,36	-1,31	-7,82	0,26	0,24
3.2. Industri Non Migas	3,92	-1,25	2,45	24,5	23,9
- Mkn,Mnm. & Tembakau	2,04	1,05	5,88	10,4	10,5
- Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	-4,62	-5,67	-10,95	2,09	1,94
- Barang. Kayu dan Hasil	11,6	-0,76	12,78	2,21	2,24
- Kertas dan Barang. Cetakan	5,61	-1,90	8,65	0,29	0,30
- Pupuk, Kimia & Barang dr	4,58	-2,93	-5,81	4,30	4,14
- Semen dan Galian Bkn	28,0	2,24	22,53	1,24	1,20
- Logam Dasar Besi dan Baja	-0,79	-4,92	8,73	1,57	1,32
- Alat Angk. Mesin &	5,33	-4,17	-0,78	1,82	1,70
- Barang Lainnya	2,36	-8,79	-2,04	0,54	0,52
<b>Sektor Industri</b>	<b>3,90</b>	<b>-1,26</b>	<b>2,37</b>	<b>24,7</b>	<b>24,1</b>

Kegiatan industri pengolahan non migas pada triwulan ini menunjukkan kinerja yang menurun. Kenaikan biaya *overhead* sektor industri terutama pasca kenaikan BBM disinyalir merupakan penyebab utama rendahnya kinerja sektor industri. Dari pemantauan survei ini, komoditi industri pengolahan non migas mengalami penurunan sebesar 1,25%, dimana pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar 3,92%. Penurunan kinerja sub sektor ini dipicu dari menurunnya pertumbuhan di hampir semua industri non migas. Penurunan tertinggi berasal dari industri barang lainnya yang menurun drastis hingga 8,79% diikuti oleh industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki yang turun sebesar minus 5,67%, industri

logam dasar besi dan baja turun sebesar minus 4,92%, industri alat angkutan, mesin dan peralatannya turun sebesar minus 4,17%, industri pupuk, kimia dan barang dari karet turun sebesar minus 2,93%, dan industri kertas dan barang cetakan dan industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya yang masing-masing turun sebesar minus 1,90% dan 0,76%. Di sisi lain industri makanan, minuman dan tembakau dan industri semen dan barang galian bukan logam, mampu tumbuh positif yaitu masing-masing sebesar 1,05% dan 2,24%.

Kontribusi sektor ini terhadap total PDRB mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 24,76% pada triwulan I 2006 menjadi 24,19% pada triwulan II 2006.

#### 4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Pertumbuhan sektor listrik, gas & air bersih pada triwulan II 2006 mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,99%, setelah triwulan sebelumnya naik sebesar 1,87%. Penurunan ini dipicu dari menurunnya kinerja sektor listrik. Kinerja sektor ini mengalami penurunan hingga sebesar 6,77%. Di lain sisi pertumbuhan gas kota dan air bersih menunjukkan arah yang positif dan membaik. Jika pada triwulan sebelumnya kedua sub sektor ini hanya mampu tumbuh masing-masing 3,63% dan 0,86%, maka di triwulan ini kedua sub sektor tersebut mampu tumbuh sebesar 5,82% dan 4,88%.

Tabel 1.6.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih  
Triwulan I - II Tahun 2006 (%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Trw. II'06 Terhadap Trw. I'06	Struktur	
	Trw. I'06	Trw. II'06		Trw. I'06	Trw. II'06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1. Listrik	1,93	-6,77	-1,01	0,84	0,80
4.2. Gas Kota	3,63	5,82	8,39	0,18	0,20
4.3. Air Bersih	0,86	4,88	2,30	0,14	0,15
<b>Sektor LGA</b>	<b>1,87</b>	<b>-3,99</b>	<b>0,24</b>	<b>1,16</b>	<b>1,15</b>

Peranan keseluruhan sektor listrik, gas dan air bersih terhadap total PDRB triwulan II 2006 sebesar 1,15% atau mengalami penurunan yaitu sebesar 0,01%, bila dibandingkan dengan triwulan I 2006.

## 5. Sektor Bangunan

Pada triwulan II 2006, kinerja sektor bangunan mengalami penurunan sebesar 0,74% setelah pada triwulan I 2006 mengalami peningkatan sebesar 3,53%. Jika kondisi triwulan ini dibandingkan terhadap triwulan II 2005, juga mengalami penurunan kinerja hingga sebesar 1,55%. Kondisi *slow down* di sektor properti merupakan dampak lanjutan dari penurunan daya beli akibat inflasi yang tinggi pada tahun 2005 serta kenaikan BBM yang mendorong kenaikan harga *raw material*.

## 6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor ini merupakan sektor penentu kemajuan sektor-sektor lainnya sebab sektor inilah penggerak utama roda perekonomian. Kinerja sektor perdagangan pada triwulan II 2006 tidak begitu menggembirakan. Jika pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh hingga sebesar 10,03%, pada triwulan ini turun hingga sebesar 1,35%. Pemicu dari merosotnya kinerja di sektor ini disebabkan oleh subsektor perdagangan besar dan eceran yang semula tumbuh sebesar 10,20%, menjadi minus 1,62%. Meskipun tidak mengadopsi kondisi yang serupa dengan sub sektor perdagangan besar dan eceran, pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran mampu untuk bertahan pada level positif meskipun dengan sedikit mengalami perlambatan. Jika pada triwulan sebelumnya kedua sub sektor ini tumbuh masing-masing sebesar 2,01% dan 8,75%, maka triwulan ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,92% dan 3,21%.

Tabel 1.7.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran  
Triwulan I-II Tahun 2006 (%)

Sektor/Lapangan Usaha (1)	Laju		Trw. II'06 (4)	Struktur	
	Trw. (2)	Trw. (3)		Trw. (4)	Trw. (5)
6.1. Perdagangan	10,20	-1,62	10,47	16,57	16,37
6.2. Hotel	2,01	0,92	8,04	0,24	0,22
6.3. Restoran	8,75	3,21	15,92	1,34	1,36
<b>Sektor Perdag, Hotel, &amp;</b>	<b>10,03</b>	<b>-1,35</b>	<b>10,71</b>	<b>18,14</b>	<b>17,95</b>

Secara keseluruhan penurunan kinerja telah menurunkan peranan sektor ini terhadap total PDRB Sumatera Utara. Pada triwulan II 2006 sektor ini menyumbang 17,95% sedangkan pada triwulan I 2006 sebesar 18,14%.

### **6.1. Sub Sektor Perdagangan**

Pada triwulan II 2006 sub sektor ini menurun hingga sebesar minus 1,62%. Penurunan pada triwulan II 2006 ini disinyalir sebagai akibat dari menurunnya output sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang secara langsung mampu melabihkan kondisi sub sektor perdagangan.

Penurunan kinerja sub sektor perdagangan berdampak pada peranannya terhadap total PDRB Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari peranan pada triwulan I 2006 sebesar 16,57%, menjadi 16,37% pada triwulan II 2006.

### **6.2. Sub Sektor Hotel**

Kinerja sub sektor ini mengalami perlambatan terhadap triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2006 sub sektor ini tumbuh sebesar 2,01%, dan pada triwulan II 2006 sub sektor ini hanya mampu tumbuh sebesar 0,92%. Sehingga peranan sub sektor ini juga sedikit mengalami penurunan, dari 0,24% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,22% pada triwulan II 2006.

### **6.3. Sub Sektor Restoran**

Kondisi yang sama dengan sub sektor hotel dialami oleh sub sektor restoran, kinerja sub sektor restoran pada triwulan II 2006 juga melambat. Jika pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,75%, namun pada triwulan ini hanya mampu tumbuh sebesar 3,21%. Namun peranan sub sektor restoran sedikit mengalami peningkatan di triwulan ini. Jika di triwulan sebelumnya hanya memberikan sumbangan sebesar 1,34% terhadap total keseluruhan nilai PDRB, maka pada triwulan ini sebesar 1,36%.

## **7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi**

Tabel 1.8.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Pengangkutan dan Komunikasi  
Triwulan I - II Tahun 2006 (%)

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>Laju</b>	<b>Trw.</b>	<b>Struktur</b>
-----------------------	-------------	-------------	-----------------

	Trw. II06	Trw. III06		Trw. IV06	Trw. V06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.1. Pengangkutan	4,29	-4,21	4,03	6,22	5,75
a. Angkutan Rel	2,70	-6,16	2,46	0,03	0,03
b. Angkutan Jalan Raya	2,51	-4,23	1,91	4,07	3,67
c. Angkutan Laut dan	-0,16	-10,03	-5,18	0,34	0,31
d. Angkutan Udara	24,05	0,29	33,37	0,70	0,66
e. Jasa Penunjang angk	4,56	-3,66	4,21	1,08	1,08
7.2. Komunikasi	10,83	3,68	18,21	1,31	1,54
<b>Sektor Angkutan dan</b>	<b>5,77</b>	<b>-2,33</b>	<b>7,28</b>	<b>7,53</b>	<b>7,29</b>

Kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan II 2006 menurun. Sektor ini mampu tumbuh sebesar 5,77% pada triwulan sebelumnya dan kemudian menurun menjadi minus 2,33%. Begitu juga dengan peranannya terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara yang juga melemah. Jika pada triwulan sebelumnya mampu menyumbang sebesar 7,53%, maka pada triwulan ini peranannya sedikit menurun menjadi 7,29%.

### **7.1. Sub Sektor Pengangkutan**

Menurunnya kinerja sub sektor ini dipicu oleh hampir semua sub sektor, terkecuali sub sektor angkutan udara. Jika dilihat kinerja kegiatan angkutan, maka kinerja angkutan laut dan ASDP mengalami penurunan yang paling drastis selama triwulan II 2006 yaitu minus 10,03%. Penurunan kinerja lainnya diikuti oleh angkutan rel yang menurun hingga minus 6,16%. Sementara penurunan yang terjadi pada angkutan jalan raya dan jasa penunjang angkutan yang di bawah level 5%. Kinerja sub sektor angkutan udara masih positif meskipun sedikit melemah jika dibandingkan dengan dengan triwulan sebelumnya yaitu hanya tumbuh sebesar 0,29%.

Dengan kondisi penurunan kinerja di hampir semua sub sektor tersebut maka peranan sub sektor pengangkutan juga sedikit melemah. Jika pada triwulan sebelumnya sub sektor ini mampun memberikan sumbangan sebesar 6,22% terhadap total PDRB Sumatera Utara, maka pada triwulan ini hanya mampu menyumbang sebesar 5,75%.

### **7.2. Sub Sektor Komunikasi**

Kondisi yang tak jauh beda juga terlihat pada sub sektor komunikasi, yang mana kinerja sub sektor ini juga mengalami perlambatan. Pada triwulan ini, sub sektor komunikasi hanya mampu tumbuh sebesar 3,68%, dibanding dengan laju pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 10,83%. Sementara peranannya pada PDRB Sumatera Utara sedikit naik. Jika pada triwulan I 2006 sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 1,31% maka pada triwulan II 2006 mampu menyumbang sebesar 1,54%.

## 8. Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan

Kinerja sektor keuangan dan jasa perusahaan pada triwulan II 2006 tidak begitu mengecewakan, sektor ini mengalami peningkatan sebesar 5,00%. Sejalan dengan meningkatnya kinerja sektor ini ternyata telah mampu meningkatkan peranannya terhadap total PDRB Sumatera Utara, dimana peranan sektor ini pada triwulan I 2006 sebesar 4,81% meningkat menjadi 5,13% pada triwulan II- 2006.

Tabel 1.9.  
Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan  
Triwulan I - II Tahun 2006  
(%)

Lapangan Usaha	Laju		Trw. II'06 Terhadap	Struktur	
	Trw. I'06	Trw. II'06		Trw. I'06	Trw. II'06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.1. Bank & Lembaga Keu.	0,97	5,53	1,43	1,93	1,99
8.2. Sewa bangunan	7,40	4,40	19,53	2,52	2,73
8.3. Jasa Perusahaan	11,23	8,88	20,84	0,37	0,41
<b>Sektor Keu &amp; Jasa</b>	<b>5,24</b>	<b>5,00</b>	<b>12,57</b>	<b>4,81</b>	<b>5,13</b>

### 8.1. Sub Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lain

Pada triwulan II 2006 ini kinerja sub sektor bank dan lembaga keuangan lainnya meningkat sebesar 5,53% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja pada sub sektor ini, telah mampu untuk meningkatkan peranannya terhadap total PDRB Sumatera Utara. Pada triwulan I 2006 peranannya sebesar 1,93%, maka pada triwulan II 2006 peranannya naik menjadi sebesar 1,99%.

### 8.2. Sub Sektor Sewa Bangunan

Kinerja sub sektor sewa bangunan pada triwulan ini mengalami perlambatan, yaitu hanya mampu tumbuh sebesar 4,40% setelah peningkatan sebesar 7,40% pada triwulan sebelumnya. Namun perlambatan kinerja pada sub sektor ini, tidak berpengaruh pada peranannya dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan yang meningkat. Pada triwulan sebelumnya sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 2,52% dan meningkat menjadi 2,73% pada triwulan II 2006.

### **8.3. Sub Sektor Jasa Perusahaan**

Kondisi yang sama dengan sub sektor sewa bangunan dialami oleh sub sektor ini. Kinerja sub sektor jasa perusahaan pada triwulan I 2006 sebesar 11,23% dan triwulan II 2006 mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 8,88%. Namun peranan sub sektor ini sedikit mengalami peningkatan, yang mana pada triwulan sebelumnya memberikan sumbangan sebesar 0,37%, meningkat menjadi 0,41% pada triwulan ini.

## **9. Sektor Jasa-Jasa**

Pada triwulan II 2006, kinerja sektor jasa-jasa menunjukkan kondisi menguat, dimana pada triwulan ini sektor jasa-jasa mampu tumbuh sebesar 5,35% lebih tinggi bila dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,72%. Dilihat dari peranannya terhadap PDRB Sumatera Utara, sektor jasa-jasa memberikan peranan sebesar 8,27% pada triwulan ini, naik dibanding triwulan sebelumnya sebesar 7,56%.

### **9.1. Sub Sektor Jasa Pemerintahan Umum**

Sub sektor jasa pemerintahan umum pada triwulan II 2006 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 8,20% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,18%. Peningkatan kinerja ini diikuti oleh membesarnya peranan sub sektor ini terhadap PDRB Sumatera Utara dari 5,17% pada triwulan sebelumnya, menjadi sebesar 5,88% pada triwulan II 2006.

Tabel 1.10.

Laju Pertumbuhan dan Struktur Sektor Jasa-Jasa Triwulan I-II Tahun 2006 (%)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan	Trw. II'06 Terhadap	Struktur
----------------	------------------	---------------------	----------

	<b>Trw. I'06</b>	<b>Trw. II'06</b>		<b>Trw. I'06</b>	<b>Trw. II'06</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
9.1. Pemerintahan Umum	1,18	8,20	14,89	5,17	5,88
9.2. Swasta	10,74	-1,85	11,91	2,38	2,39
a. Sosial Kemasyarakatan	1,03	1,86	4,03	0,72	0,75
b. Hiburan dan Rekreasi	14,06	-2,24	15,72	0,30	0,30
c. Perorangan & RT	16,88	-4,14	16,65	1,36	1,34
<b>Sektor Jasa-Jasa</b>	<b>3,72</b>	<b>5,35</b>	<b>14,09</b>	<b>7,56</b>	<b>8,27</b>

### **9.2. Sub Sektor Jasa Swasta**

Pertumbuhan sub sektor jasa swasta pada triwulan II 2006 menurun drastis dari 10,74% pada triwulan sebelumnya menjadi minus 1,85% pada triwulan II 2006. Penurunan pertumbuhan sub sektor ini dipicu oleh menurunnya kinerja sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga yang menurun dari 16,88% pada triwulan sebelumnya menjadi minus 4,14% dan sub sektor jasa hiburan dan rekreasi yang menurun dari 14,06% menjadi minus 2,24% pada triwulan ini. Menurunnya kinerja sub sektor jasa swasta pada triwulan II 2006 ternyata tidak mempengaruhi peranan sub sektor ini terhadap total PDRB secara keseluruhan. Jika pada triwulan sebelumnya sektor ini mampu memberikan peranan sebesar 2,38% maka pada triwulan II 2006 peranannya naik tipis menjadi 2,39%.

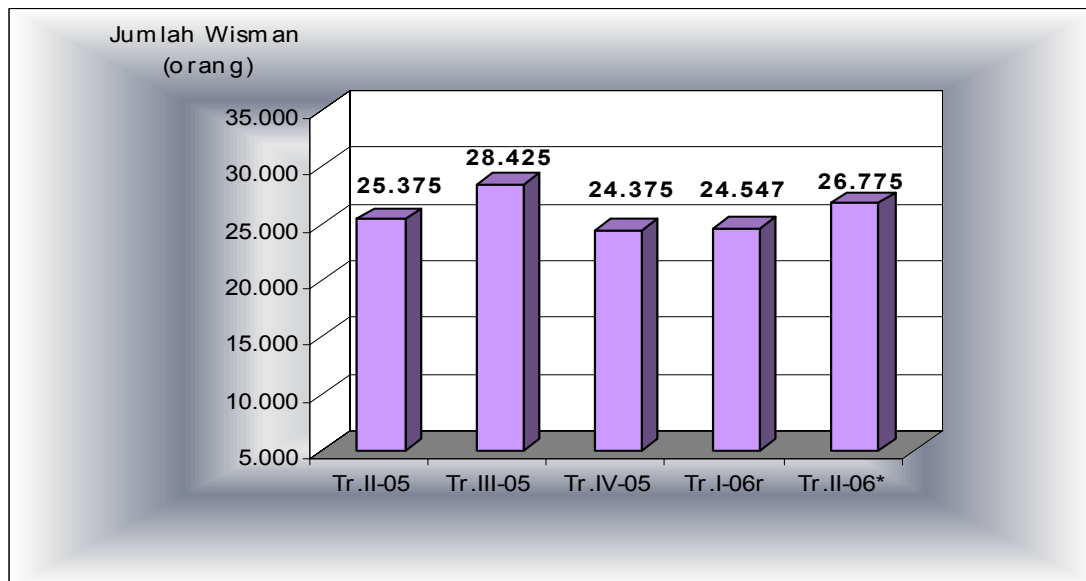


## 10. PARIWISATA

Sumatera Utara telah menjadi topik pembicaraan yang cukup hangat di tingkat internasional sejak penyelenggaraan "*Lake Toba Summit 2005*" yang lalu di kawasan Danau Toba Prapat yang merupakan pertemuan gubernur seluruh dunia. Nama Sumatera Utara dan khususnya Danau Toba kembali terangkat berkat diadakannya "*Lake Toba Eco-Tourism Sport II*" pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2006.

Dengan adanya *event* bertaraf internasional ini, nampaknya memiliki dampak positif pada kondisi pariwisata di Sumatera Utara. Pada triwulan II tahun 2006, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Utara melalui pintu masuk Bandara Polonia diperkirakan mencapai 26.775 orang. Wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Utara sebagian besar berkebangsaan Malaysia. Namun banyak juga wisatawan berkebangsaan Singapura dan Belanda yang berkunjung baik dengan visa maupun tanpa visa.

Grafik 1.1  
Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Sumatera Utara melalui  
Polonia  
Triwulan II 2005 - Triwulan II 2006



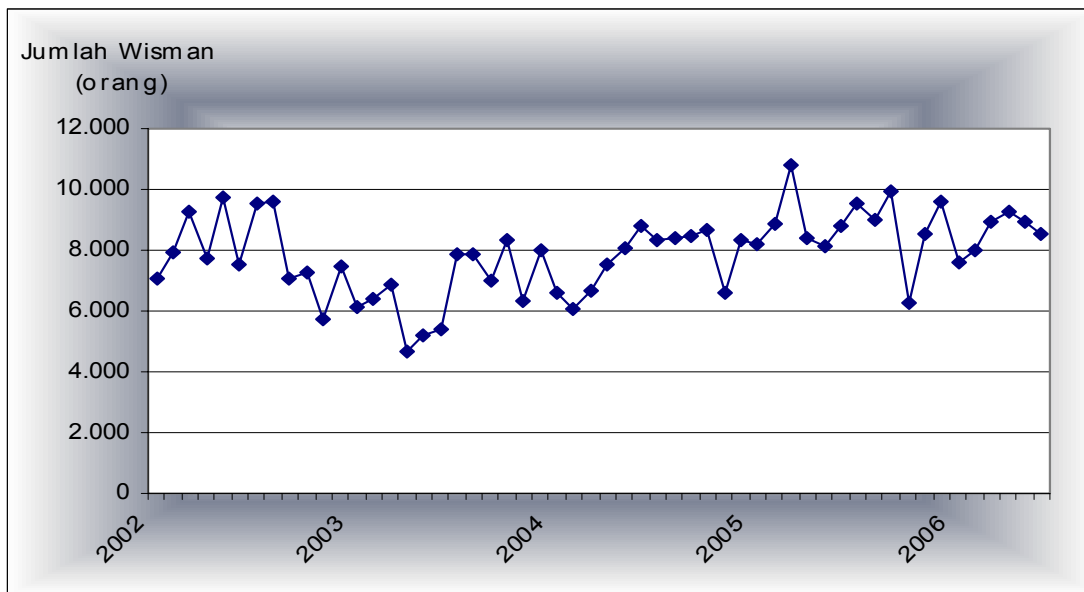
*Keterangan: r) Triwulan I 2006 merupakan angka revisi*

*\*) Triwulan II 2006 masih angka perkiraan*

Berbeda dengan kondisi pada triwulan II tahun 2005, angka wisman di triwulan ini menunjukkan adanya peningkatan dari angka triwulan sebelumnya.

Besarnya peningkatan sekitar 9,08% dari jumlah wisman yang tercatat sebanyak 24.547 orang pada triwulan I tahun 2006. Demikian juga jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2005, jumlah wisman pada triwulan ini mengalami peningkatan sebesar 5,52%.

**Grafik 1.2**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Sumatera Utara melalui**  
**Polonia**  
**Januari 2002 – Juni 2006**



*Keterangan: Juni 2006 masih angka perkiraan*

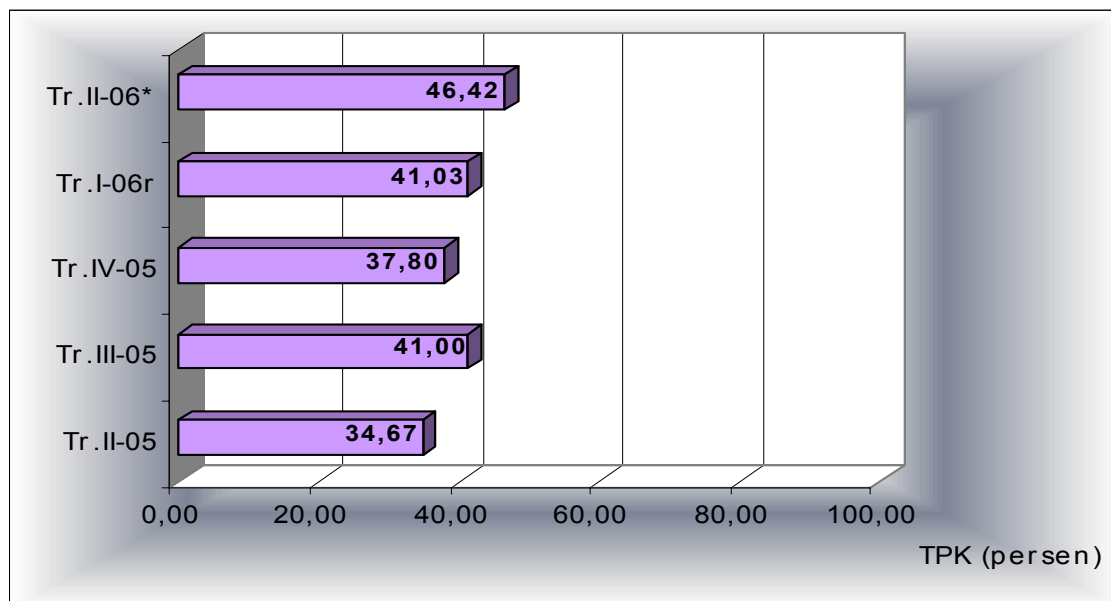
Secara kumulatif, sampai dengan semester I tahun 2006, jumlah wisman yang berkunjung ke Sumatera Utara melalui pintu gerbang Polonia sekitar 51.322 orang. Sementara itu pada periode yang sama tahun 2005 jumlah wisman yang tercatat sebanyak 53.269 orang. Membandingkan kedua periode tersebut, terjadi penurunan jumlah wisman di tahun 2006 sebesar 3,66%. Hal ini sangat disayangkan melihat kunjungan wisman selama tahun 2005 menunjukkan angka yang cukup menggembarakan. Nampaknya sektor pariwisata masih menjadi PR di Sumatera Utara mengingat Kota Medan sebagai ibukota provinsi yang telah dianugerahi penghargaan adipura pada bulan Juni 2006.

Selain jumlah wisatawan yang berkunjung, indikator pariwisata lain yang dapat menggambarkan kondisi dunia pariwisata adalah Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK). Tingginya TPK suatu hotel mencerminkan tingginya aktivitas

perhotelan, sebaliknya rendahnya TPK suatu hotel mencerminkan rendahnya aktivitas perhotelan suatu daerah.

Pada Triwulan II 2006, rata-rata TPK Hotel Berbintang di Sumatera Utara diperkirakan mencapai 46,42%. Persentase ini lebih tinggi 5,40% dibandingkan rata-rata TPK Hotel Berbintang triwulan sebelumnya yang mencapai 41,03%. Rata-rata TPK Hotel Berbintang pada triwulan II 2006 ini juga lebih tinggi sekitar 11,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 34,67%.

Grafik 1.3  
Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Sumatera Utara  
Triwulan II 2005 – Triwulan II 2006



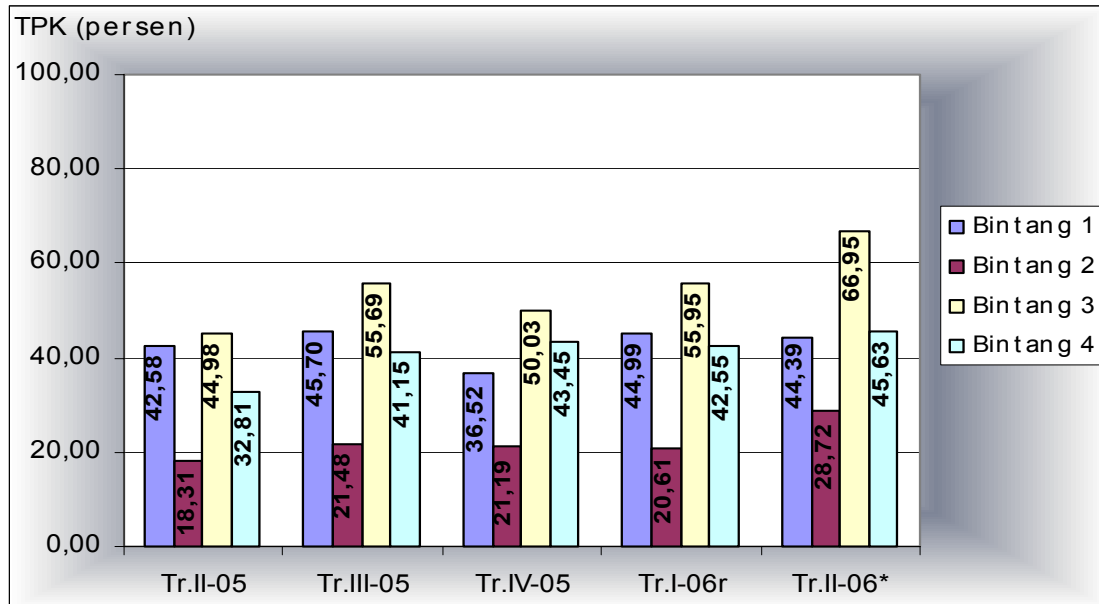
*Keterangan: r) Triwulan I 2006 merupakan angka revisi  
\*) Triwulan II 2006 masih Angka Perkiraan*

Jika dirinci berdasarkan klasifikasi hotel berbintang, TPK hotel tertinggi pada triwulan II 2006 terjadi pada klasifikasi hotel bintang III dimana jumlah kamar terhuni setiap malam mencapai 66,95%, diikuti oleh hotel bintang IV yaitu 45,63%, hotel bintang I sebesar 44,39%, dan terakhir hotel bintang II yang hanya terisi 28,72%. Hal ini mengindikasikan bahwa minat wisatawan baik yang berasal dari mancanegara maupun wisatawan domestik atau lokal, cenderung untuk memilih hotel berbintang tiga untuk menginap daripada hotel berbintang lainnya.

Dari empat klasifikasi hotel, diperkirakan hanya TPK klasifikasi hotel bintang I yang mengalami penurunan, sementara tiga klasifikasi lainnya mengalami

peningkatan. Penurunan yang terjadi sekitar 0,60% dari angka triwulan I tahun 2006.

Grafik 1.4  
Rata-rata TPK Hotel Berbintang di Sumatera Utara menurut Klasifikasi Hotel  
Triwulan II 2005 – Triwulan II 2006



*Keterangan: r) Triwulan I 2006 merupakan angka revisi*

*\*) Triwulan II 2006 masih Angka Perkiraan*

Secara agregat jumlah malam kamar terjual pada triwulan II 2006 ini diperkirakan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan TPKnya hingga mencapai 16,40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan II pada tahun 2005 maka banyaknya malam kamar terjual ternyata juga menunjukkan adanya peningkatan hingga 28,94%.

## 1.2 SISI PENGGUNAAN

PDRB atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2006 yang senilai Rp40.435.07 miliar sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp20.921,45 miliar (51,74%). Komponen penggunaan lainnya adalah konsumsi pemerintah sebesar Rp3.529,48 miliar (8,73%), pembentukan modal tetap bruto sebesar Rp5.479,70 miliar (13,55%), transaksi ekspor sebesar Rp14.337,44 miliar (35,46%) dan impor sebesar Rp4.754,77 miliar (11,76%). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (triwulan I), PDRB harga berlaku mengalami penurunan dari Rp40.735,83 miliar menjadi Rp40.435,07 miliar atau turun sebesar 0,74%. Hal ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, penurunan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto, sedangkan untuk komponen penggunaan lainnya tetap mengalami kenaikan walaupun pertumbuhannya menunjukkan trend yang berbeda untuk tiap komponen.

Tabel 1.11  
 Nilai PDRB Sumatera Utara Menurut Komponen Penggunaan  
 Triwulan I – II Tahun 2006  
 (Rp miliar)

Komponen Penggunaan	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Triw I'06	Triw II'06	Triw I'06	Triw II'06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah	20.661,12	20.921,45	13.587,88	13.716,96
2. Konsumsi	3.036,16	3.529,48	2.066,04	2.179,67
3. Pembentukan Modal	5.583,44	5.479,70	3.733,28	3.662,26
4. Residual	2.287,06	921,77	(1.075,25)	(1.525,69)
5. Ekspor Luar Negeri	13.293,13	14.337,44	8.172,50	8.521,00
6. Dikurangi Impor	4.125,08	4.754,77	3.470,66	3.856,59
<b>PDRB</b>	<b>40.735,83</b>	<b>40.435,07</b>	<b>23.013,80</b>	<b>22.697,62</b>

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga baik atas harga berlaku maupun konstan bergerak sangat lambat, pada triwulan II pertumbuhan atas harga berlaku hanya 1,26% dan 0,95% atas harga konstan. Sedangkan pertumbuhan triwulan II-2005 sampai dengan triwulan II-2006 (*year on year*) mengalami peningkatan yang cukup berarti bagi terciptanya multiplier effect yaitu tumbuh sebesar 7,36%.

Tabel 1.12.

Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Sumatera Utara  
Menurut Komponen Penggunaan ADH Konstan 2000  
Triwulan I - II Tahun 2006  
(%)

Komponen Penggunaan	Laju Pertumbuhan		Trw. II'06 Thd. Trw. II'05	Struktur	
	Trw I'06	Trw II'06		Trw I'06	Trw II'06
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	0,39	0,95	7.36	50,72	51.74
2. Konsumsi Pemerintah	0,21	5,50	10.95	7,45	8.73
3. Pembentukan Modal Tetap	5,03	(1,90)	3.97	13,71	13,55
4. Residual	-	-	-	5,61	2.28
5. Ekspor Luar Negeri	(3,66)	4,26	31,53	32,63	35.46
6. Dikurangi Impor Luar	7,80	11,12	54,91	10,13	11.76
<b>PDRB</b>	<b>4,11</b>	<b>-1,37</b>	<b>5,70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Konsumsi pemerintah pada triwulan II mulai menunjukkan peningkatan, sehingga terjadi peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 5,50%, sedangkan terhadap triwulan II-2005 peningkatan mencapai 10,95%. Peningkatan konsumsi pemerintah didorong oleh kenaikan gaji PNS baik gaji pokok maupun tunjangan fungsional/struktural. Sampai triwulan II diperkirakan dana yang telah terserap mencapai 40% lebih dari dana yang dianggarkan. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pertumbuhan investasi yang dilihat dari Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan II mengalami penurunan sebesar minus 1,90%, sementara itu jika dibandingkan pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year*) menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 3,97%. Pertumbuhan PMTB selama periode 2005-2006 menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Perlambatan ini secara umum dipengaruhi oleh iklim investasi yang belum kondusif dan daya beli masyarakat yang belum membaik serta suku bunga nominal kredit yang masih tinggi. Selain itu tingginya biaya produksi, faktor teknis dan kurangnya permintaan dari masyarakat maupun dunia usaha turut mendukung perlambatan PMTB.

Pada triwulan II 2006, transaksi ekspor impor mulai menunjukkan peningkatan jika dibandingkan pada triwulan I (4,26% untuk ekspor dan 11,12% untuk impor). Begitu juga jika dibandingkan pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year*) menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan (31,53% untuk ekspor dan 54,91% untuk impor). Ekspor luar negeri Sumatera Utara sebagian besar adalah hasil industri olahan kelapa sawit berupa CPO (*crude palm oil*) dan minyak inti sawit serta hasil-hasil pertanian. Komoditi ekspor tersebut dikirim terutama ke negara-negara di Benua Asia dan sebagian kecil ke Benua Eropa. Sedangkan komoditi impor sebagian besar berasal dari negara-negara se-Asia Tenggara berupa bahan baku dan bahan penolong untuk industri.

## 1.3. SISI PENGELUARAN

### 1.3.1 Konsumsi

Survei Konsumen yang dilakukan pada triwulan II tahun 2006 terhadap responden di kota Medan dan sekitarnya menunjukkan bahwa secara umum keyakinan konsumen terhadap perekonomian masih pesimis. Indikasi ini didasarkan kepada Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih memperlihatkan trend yang menurun.

Konsumen mempersepsikan bahwa Kondisi Ekonomi saat ini masih pesimistik yang ditunjukkan dengan indeks sebesar 66,67. Ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini dan untuk 6 bulan ke depan juga cenderung semakin sedikit dengan indeks masing-masing sebesar 60,63 dan 80,32. Namun untuk 6 bulan yad ekspektasi kondisi ekonomi memperlihatkan trend yang optimis dengan indeks sebesar 100,63

Selain itu konsumen tetap optimis dengan ekspektasi penghasilan 6 bulan yad. diprediksi sebesar 118,10. Alasan ekspektasi penghasilan untuk 6 bulan ke depan meningkat karena diharapkan adanya perubahan kenaikan gaji/omzet usaha (53,38% responden), membuka usaha sampingan (16,54% responden), ada penerimaan bonus/THR (12,78% responden) dan ada anggota keluarga memperoleh pekerjaan (8,27% responden).

Indikator ekonomi lain yang memperlihatkan kondisi optimis meliputi ketersediaan barang/jasa, suku bunga simpanan dan ekspektasi tabungan 6 bulan ke depan secara berturut-turut indeks sebesar 120,95, 102,22, dan 111,11. Responden menyatakan akan terjadi perubahan harga untuk 3 bulan yad, 6 bulan yad dan di akhir tahun 2006 secara signifikan. Kelompok bahan makanan, perumahan, listrik, gas dan bahan bakar merupakan komoditas yang diprediksi mengalami perubahan harga tertinggi pada 3 bulan yad, 6 bulan yad dan diakhir tahun 2006.

Rencana konsumsi responden sangat bervariasi, sebanyak 64,13% responden menyatakan saat ini merupakan waktu yang tidak tepat untuk melakukan pembelian barang tahan lama. Untuk kondisi ekonomi saat ini responden akan merencanakan pembelian terhadap komputer (14,70%), CD/VCD/DVD player (12,19%), motor (11,11%), furniture (9,68%), mesin cuci (8,96%), Televisi (8,60%),



kompas gas (7,89%), Lemari es (7,53%), mobil (6,09%), AC (4,30%) dan home stereo (5,02%).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) bergerak turun dibanding survei bulan lalu. IKK melemah sebesar 9,37 poin yaitu dari posisi 94,71 pada Mei 2006 menjadi 84,34. IKE juga melemah sebesar 11,96 poin dari posisi 80,95 pada Mei 2006 menjadi 68,99 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) bergeser turun sebesar 8,79 poin dari posisi 108,47 pada Mei 2006 menjadi 99,68. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.13 Indeks Hasil Survei Konsumen Di Kota Medan**

Bulan Survei	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)
Januari-2006	91.75	75.13	108.36
Februari-2006	98.78	83.70	113.86
Maret-2006	91.06	73.44	108.68
<b>Triwulan I-06</b>	<b>93,86</b>	<b>77,42</b>	<b>110,3</b>
April-2006	94.18	79.79	108.57
Mei-2006	94.71	80.95	108.47
Juni-2006	84.34	68.99	99.68
<b>Triwulan II-06</b>	<b>91,08</b>	<b>76,58</b>	<b>105,57</b>

Dari sisi produsen, Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran secara bulanan selama triwulan laporan, secara umum total, nilai penjualan masih menunjukkan penurunan. (uraian lebih detail dapat dilihat pada boks Survei Penjualan Eceran).

### 1.3.2 INVESTASI

Berdasarkan perkembangan investasi baik PMDN dan PMA di provinsi Sumatera Utara selama periode semester I tahun 2006, realisasi investasi yang diharapkan semakin baik di Sumut tidak terjadi. Sebaliknya, selama kurun waktu tersebut, relatif hanya 1 proyek PMDN dan 2 proyek PMA yang berhasil direalisasikan, masing-masing senilai Rp42 miliar dan US\$ 7 juta. Sebaliknya, berdasarkan pemantauan terhadap persetujuan dan rencana penanaman modal yang akan dilakukan, provinsi Sumatera Utara termasuk salah satu provinsi yang paling banyak diminati investor domestik selain provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Sementara untuk investor asing, provinsi Sumut bersaing dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.

Secara rinci, Lokasi yang banyak diminati oleh PMDN adalah Kalimantan Timur = Rp. 37.862,2 milyar (11 proyek), Sumatera Utara = Rp. 8.332,9 milyar (7 proyek), Kalimantan Barat = Rp. 4.271,2 milyar (7 proyek), Jawa Timur = Rp. 2.866,3 milyar (11 proyek) dan Jawa Tengah = Rp. 2.582,6 milyar (2 proyek).

Sedangkan untuk PMA Lokasi yang banyak diminati oleh PMA adalah DKI Jakarta = US\$. 1.150,3 juta (388 proyek), Jawa Barat = US\$. 1.122,7 juta (117 proyek), Jawa Timur = US\$. 1.018,8 juta (46 proyek), Sumatera Utara = US\$. 522,2 juta (15 proyek) dan Banten = US\$. 397,7 juta (61 proyek).

Tingginya minat investor baik domestik dan asing untuk menanamkan modalnya di Sumut menunjukkan bahwa di satu sisi provinsi ini memiliki potensi usaha yang sangat besar. Namun di sisi lain, minimnya realisasi yang terjadi juga menegaskan bahwa potensi yang cukup besar tersebut masih belum dapat dioptimalkan baik karena berbagai hambata regulasi maupun iklim usaha yang belum kondusif.

### CASE BOX 1

#### Permasalahan Investasi di Sumatera Utara

1. Secara umum, potensi dunia usaha dan investasi di Sumut **tetap prospektif**, hanya kendala klasik yang sangat berperan dalam menimbulkan ketidakpastian terhadap minat investasi dan kelangsungan iklim usaha juga tetap besar, sehingga dunia usaha **relatif pesimis** terhadap potensi investasi tahun 2006.
2. Pemerintah pusat melalui **Inpres No. 3 Tahun 2006** telah berupaya untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi, antara lain yang menyentuh aspek teknis di bidang kepabeanaan, perpajakan, ketenagakerjaan, usaha kecil, menengah dan koperasi hingga secara umum yang menyangkut penguatan kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan pusat. namun langkah-langkah tersebut belum dirasakan oleh para investor karena **lebih bersifat strategis dan pembenahan dalam jangka panjang, tanpa ditindaklanjuti oleh kebijakan kongkret di daerah yang justru menjadi kendala investasi** seperti :
  - **Koordinasi perijinan investasi antara pusat dan daerah.** Lembaga investasi daerah relatif tidak mempunyai kewenangan prinsip terhadap ijin investasi, sementara seluruh data juga bersifat terpusat.
  - Investor masih dihadapkan pada kompleksitas birokrasi dan belum memiliki kejelasan/kemudahan **one stop service** yang tersistematis pada satu pintu (paling tidak terdapat koordinasi skematis yang jelas terhadap proses investasi). Proses perizinan harus dilakukan dengan instansi yang berbeda.
  - Masih tingginya praktek **Ekonomi Biaya Tinggi** yang ditimbulkan baik oleh pemerintah sebagai regulator (perda bermasalah, pajak dan retribusi yang berlebihan, hingga birokrasi), pengusaha/korporasi (pungutan asosiasi dan kemampuan permodalan – suku bunga tinggi), dan kultur masyarakat (premanisme).
3. Aspek permasalahan umum yang bersifat nasional seperti keamanan dan ketertiban, ketidakpastian hukum/peraturan, perpajakan, masalah perburuhan/ketenagakerjaan, eforia otonomi daerah, pungutan liar, birokrasi yang rumit.
4. Berbagai permasalahan yang bersifat nasional tersebut diharapkan dapat diperbaiki dengan upaya kebijakan konkret yang menindaklanjuti Inpres No. 3 Tahun 2006. Sementara sebagai upaya Sumut untuk mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi, pemerintah daerah telah berupaya untuk mulai menghapuskan dan mengevaluasi beberapa perda di wilayah Provinsi maupun kabupaten/kota untuk dilakukan peninjauan ulang. Beberapa contoh Perda yang telah dibatalkan antara lain yang terkait dengan retribusi sertifikasi mutu barang (No.4 Tahun 2003) dan penyelenggaraan mutu barang (No.7 Tahun 2002), serta masih banyak lagi perda lain yang telah dibatalkan. **(kurang lebih 11 kabupaten/kota telah membatalkan beberapa perda yang dianggap telah mengurangi efisiensi iklim usaha yang kondusif).** – listnya secara detail dapat diperoleh di KBI Medan.

## CASE BOX 2

### Peringkat Realisasi Investasi

Realisasi investasi PMDN dan PMA provinsi Sumatera Utara periode semester I tahun 2006 tidak menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Selama periode tersebut, Sumut hanya menempati posisi ke 15 dalam realisasi PMDN dengan jumlah proyek 1 senilai Rp42 miliar atau dengan kontribusi hanya sebesar 0,38%. Sementara untuk realisasi PMA, Sumut juga hanya menempati posisi ke 14 dengan jumlah proyek sebanyak 4 senilai US\$7 juta dengan pangsa pasar sebesar 0,20%.

Realisasi PMDN Sumut sepanjang semester I tahun 2006 berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 393 orang tenaga kerja lokal atau dengan pangsa sebesar 0,94% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sementara untuk PMA, total tenaga kerja asing yang berhasil di serap adalah sebanyak 251 orang dengan kontribusi sebesar 0,18% terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional. Dibandingkan pada tahun 2005, penyerapan tenaga kerja hingga semester I masih sangat kecil. Pada tahun 2005, total tenaga kerja lokal yang berhasil diserap sebanyak 5.217 orang, sementara tenaga kerja asing yang berhasil diserap sebanyak 3.004 orang.

PMDN					PMA				
NO.	Lokasi	PROYEK/	NILAI /	%	NO.	Lokasi	PROYEK/	NILAI /	%
		Project	Value				Project	Value	
1	Banten	12	3.297	29	1	Jabar	117	1.249	36
2	DKI Jakarta	22	2.721	24	2	DKI Jakarta	187	446	13
3	Riau	6	1.701	15	3	Kaltim	3	396	11
4	KalTeng	3	774	7	4	Banten	53	354	10
5	Lampung	1	607	5	5	Jateng	24	337	10
6	Kalsel	4	484	4	6	Riau	5	289	8
7	Jabar	11	446	4	7	Jatim	29	236	7
8	Jatim	11	341	3	8	Lampung	3	79	2
9	Sumsel	3	160	1	9	Bali	40	42	1
10	Kaltim	2	153	1	10	Sumsel	2	25	1
11	Jambi	2	140	1	11	Sulsel	3	12	0
12	Jateng	5	107	1	12	Kepri	2	11	0
13	Kalbar	1	79	1	13	Kalsel	1	10	0
14	Sulsel	4	69	1	14	Sumut	2	7	0
15	Sumut	1	42	0	15	Kalteng	1	7	0
16	Bali	4	38	0	16	D.I Yogyakarta	4	3	0
17	Papua	1	21	0	17	NTB	4	3	0
18	NTB	2	4	0	18	NTT	2	2	0
19	Maluku Utara	1	0	0	19	Sulut	2	1	0
	<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>11.185</b>	<b>100</b>	20	Papua	1	1	0
					21	Babel	1	0	0
					22	Sulteng	1	0	0
					<b>Jumlah</b>	<b>487</b>	<b>3.510</b>	<b>100</b>	

### CASE BOX 3

#### Peringkat Persetujuan Investasi

Dari 24 provinsi tertinggi penyumbang persetujuan PMDN dan PMA di seluruh Indonesia, provinsi Sumut memberikan kontribusi yang signifikan yakni dengan menempati posisi kedua dalam persetujuan PMDN yaitu sebesar Rp8.333 miliar atau dengan pangsa 12,44%, sementara untuk persetujuan PMA provinsi Sumut menempati peringkat ke 4 dengan total nilai sebesar US\$522 juta atau dengan pangsa sebesar 8,74%.

Tingginya nilai persetujuan di provinsi Sumut baik untuk PMDN dan PMA menunjukkan bahwa provinsi Sumut memiliki potensi yang menjanjikan baik untuk investor domestik maupun investor asing. Namun demikian, berbagai kendala dan hambatan investasi yang masih terus menghadang menyebabkan investor tidak berani atau seringkali menghadapi kendala di lapangan yang menghambat realisasi investasi tersebut.

PMDN					PMA				
NO.	Lokasi	PROYEK /	NILAI /		NO.	Lokasi	PROYEK/	NILAI /	
		Project	Value				Project	Value	
1	Kaltim	11	37.862	57	1	DKI Jakarta	388	1.150	19
2	Sumut	7	8.333	12	2	Jabar	117	1.123	19
3	Kalbar	7	4.271	6	3	Jatim	46	1.019	17
4	Jatim	11	2.866	4	4	Sumut	15	522	9
5	Jateng	2	2.583	4	5	Banten	61	398	7
6	Sumsel	2	2.480	4	6	Riau	13	306	5
7	Banten	12	2.435	4	7	Kaltim	20	257	4
8	Jabar	13	1.525	2	8	NAD	4	225	4
9	DKI Jakarta	11	1.231	2	9	Kepri	36	132	2
10	Lampung	1	896	1	10	Sumsel	3	127	2
11	Sulsel	1	882	1	11	Lampung	5	103	2
12	Sumbar	-	603	1	12	Kalteng	4	94	2
13	Jambi	1	327	0	13	Kalbar	6	92	2
14	NAD	2	219	0	14	Kalteng	12	86	1
15	Kalteng	1	112	0	15	Jateng	24	66	1
16	Kalsel	2	94	0	16	D.I. Yogyakarta	7	46	1
17	Sulteng	-	72	0	17	Papua	4	43	1
18	D.I Yogyakarta	-	63	0	18	Maluku	1	39	1
19	Sulut	4	59	0	19	Bali	66	34	1
20	Riau	-	26	0	20	Jambi	3	31	1
21	Bali	3	23	0	21	Sulteng	2	26	0
22	Papua	-	19	0	22	Bengkulu	-	16	0
23	Maluku Utara	1	5	0	23	Gorontalo	1	15	0
24	NTT	2	3	0	24	Sulut	5	13	0
	<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>66.989</b>	<b>100</b>	25	NTB	7	6	0
					26	Babel	5	5	0
					27	Sumbar	5	2	0
					28	Sulteng	1	2	0
					29	NTT	2	1	0
					30	Maluku Utara	1	1	0
						<b>Jumlah</b>	<b>864</b>	<b>5.978</b>	<b>100</b>

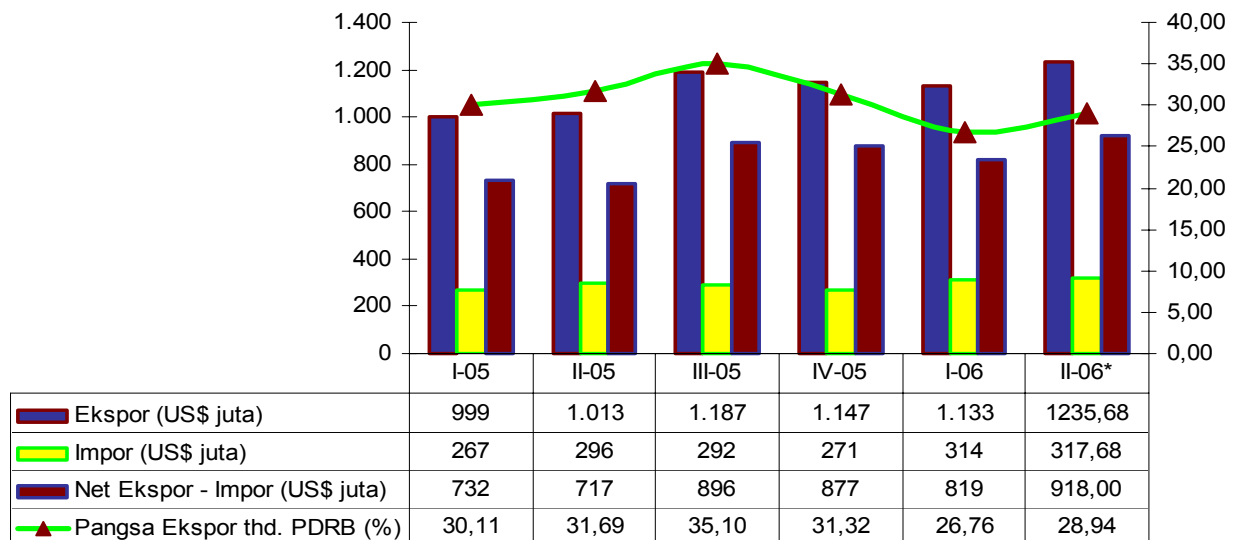
Sumber : BKPM

### 1.3.3 PERDAGANGAN INTERNASIONAL<sup>2</sup>

Dalam konsep PDB (Produk Domestik Bruto) yang dilakukan secara nasional, komponen ekspor dan impor diartikan sebagai barang dan jasa yang keluar dari pabean Indonesia, namun untuk penghitungan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengertian ekspor dan impor adalah lalu lintas barang dan jasa yang keluar dan masuk wilayah Sumut baik antar provinsi maupun dengan negara lain (dapat dilihat dari PDRB menurut Penggunaan).

Untuk konsep **Perdagangan Internasional** yang akan disajikan berikut, pengertian ekspor dan impor adalah lalu lintas barang dan jasa yang dari dan ke luar negeri berdasarkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Grafik 1.5 Ekspor Impor Sumatera Utara (US\$ juta)



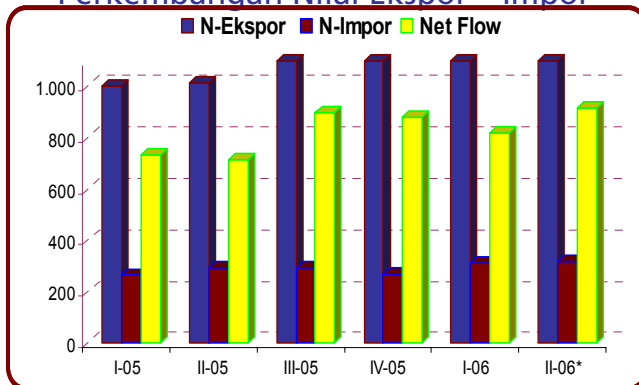
Pada triwulan II tahun 2006, perkembangan perdagangan internasional provinsi Sumut diperkirakan bergerak positif yang ditandai dengan peningkatan pangsa ekspor terhadap PDRB yakni dari sebesar 26,76% pada triwulan I yang lalu

<sup>2</sup> Sejak triwulan IV tahun 2004, terjadi perubahan mendasar dalam proses pengolahan dan pengambilan data yang bersifat on line dengan bekerja sama antara Bank Indonesia dengan pihak Bea Cukai serta yang kemudian diolah untuk disesuaikan dengan penggolongan/klasifikasi barang menurut standar internasional

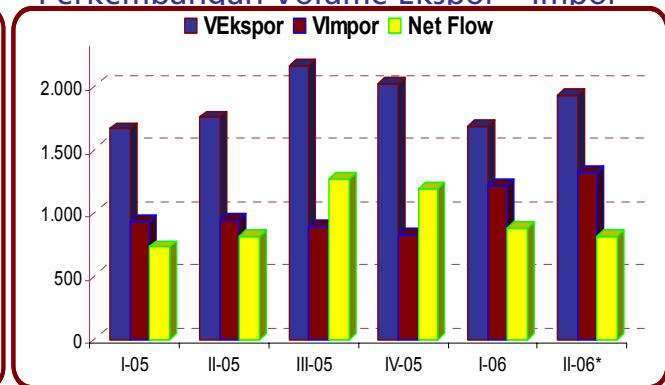
menjadi 28,94% pada triwulan laporan. Peningkatan kinerja perdagangan internasional tersebut terutama didorong oleh semakin membaiknya kinerja ekspor, sementara impor juga tumbuh positif dengan tingkat yang lebih rendah. Peningkatan ekspor tersebut selain diakibatkan oleh kurs rupiah yang sedikit mengalami fluktuasi pelemahan pada pertengahan triwulan laporan. Selain itu, peningkatan kinerja ekspor juga di dorong siklus musiman tahunan yang diperkirakan terus meningkat hingga triwulan III mendatang.

Secara triwulan, ekspor bersih mengalami pertumbuhan 12,02% menjadi sebesar US\$918 juta. Realisasi nilai ekspor tumbuh 9,05% dari US\$1.133 juta menjadi US\$1.236 juta. Hal serupa dialami realisasi impor yang naik 1,30% dari US\$.314 juta menjadi US\$.318 juta.

**Grafik 1.6**  
**Perkembangan Nilai Ekspor – Impor**



**Grafik 1.7**  
**Perkembangan Volume Ekspor – Impor**



Berdasarkan jumlah volumenya, ekspor mengalami kenaikan 14,26% dari 1.681 ribu ton menjadi 1.921 ribu ton, sementara realisasi impor juga meningkat 8,76% dari 1.210 ribu ton menjadi 1.316 ribu ton sehingga volume ekspor bersih yang terjadi kembali mencatat penurunan yakni dari 471 ribu ton menjadi 605 ribu ton.

**BOKS - 1**  
**SURVEI PENJUALAN ECERAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2006**

**I. LATAR BELAKANG**

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui pengendalian likuiditas perekonomian (jumlah uang beredar) dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah khususnya berkenaan dengan pengendalian inflasi. Untuk menyusun kebijakan, dibutuhkan informasi antara lain mengenai perkembangan penawaran dan permintaan pada sektor riil.

SPE merupakan survei berkala bersifat mikro yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang menggambarkan kecenderungan pengeluaran masyarakat (*consumption spending*) melalui sisi penjualan di tingkat pengecer (*retailer*). Survei ini diharapkan juga dapat digunakan untuk mengetahui indikasi awal perkembangan sisi permintaan, khususnya terhadap barang konsumsi.

**II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**2.1 Perkembangan Realisasi Nilai Penjualan Triwulan I Tahun 2006**

Survei yang dilakukan pada triwulan laporan ini masih mengindikasikan terjadinya penurunan realisasi penjualan. Meskipun pemerintah tidak menaikkan kelompok barang *administered price* pada semester I tahun 2006, tampaknya secara umum responden belum melihat adanya kenaikan daya beli yang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi di luar kelompok barang yang bersifat primer.

**Tabel - 1.1**  
**Pertumbuhan Nilai Penjualan Berdasarkan Kelompok Barang**  
**Triwulan III Tahun 2005 (Rp.Juta)**

Jenis Barang	I-06	II-06*	Δ	Growth (%)
Bahan Konstruksi	1.171,10	1.612,23	441,14	37,67
Suku Cadang	257,89	242,00	(15,89)	(6,16)
Perlengkapan Rumah Tangga	1.331,84	1.226,11	(105,73)	(7,94)
Barang Kerajinan dan Mainan	427,73	458,63	30,90	7,22
Makanan dan Tembakau	4.831,92	4.381,94	(449,98)	(9,31)
Pakaian dan Perlengkapannya	699,41	530,80	(168,61)	(24,11)
Bahan Kimia	1.382,82	1.279,05	(103,77)	(7,50)
Kelompok Bahan Bakar	10.802,38	9.425,15	(1.377,23)	(12,75)
Peralatan Tulis	614,83	542,86	(71,97)	(11,71)
<b>JUMLAH</b>	<b>21.519,90</b>	<b>19.698,78</b>	<b>(1.821,13)</b>	<b>(8,46)</b>

\*Posisi Juni 2006 sementara

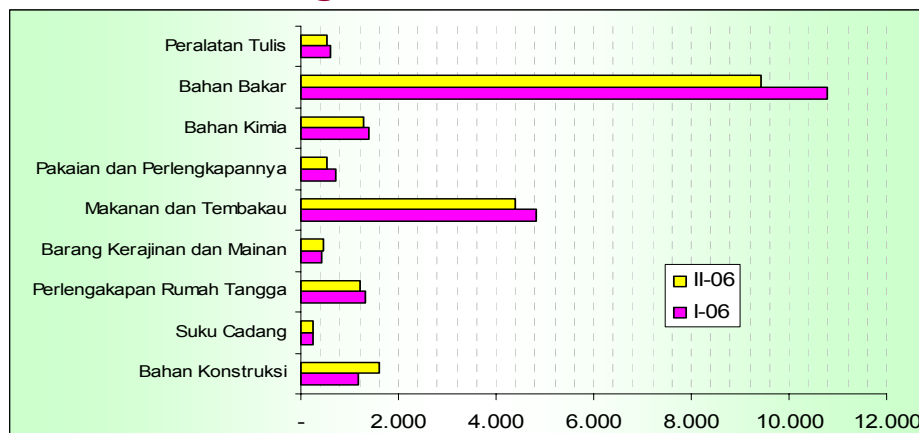


Total Nilai Penjualan yang terealisasi pada bulan triwulan II-2006 mengalami penurunan cukup besar yakni hingga 8,46% dari Rp21,52 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp19,70 miliar. (Tabel 1.1).

Secara umum, nilai penjualan eceran menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada hampir seluruh kelompok barang yang di survei. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok barang bahan bakar yakni sebesar Rp1,38 miliar (12,75%), serta kelompok bahan makanan dan tembakau sebesar Rp450 juta (9,31%). Sementara satu-satunya kelompok yang mengalami peningkatan nilai penjualan terjadi pada kelompok barang bahan konstruksi, yakni sebesar Rp441 juta atau naik 37,67%.

Kenaikan yang cukup besar pada kelompok barang bahan bangunan sesuai dengan perkiraan awal terkait dengan pembangunan fisik secara besar-besaran di provinsi NAD (*construction booming*). Meskipun tidak terjadi lonjakan luar biasa, namun selama triwulan laporan terlihat bahwa hampir seluruh sub kelompok bahan konstruksi yang terdiri dari semen, pasir, bahan konstruksi dari logam dan tanah liat, hingga perlengkapan konstruksi lainnya mencatat pertumbuhan yang positif. Sementara kelangkaan dan permasalahan yang cukup pelik di sektor kehutanan dengan produk kayu-kayuan masih terus terjadi dan mengakibatkan nilai penjualan bahan konstruksi dari kayu masih mencatat pertumbuhan negatif hingga 21,7% pada triwulan laporan.

**Grafik - 1.1**  
**Perkembangan Linked Indeks Triwulanan**



## **2.2 Perkembangan Linked Index**

Indeks berantai (*Linked Indeks*) adalah satuan yang menggambarkan perbandingan nilai penjualan periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Indeks di atas 1 berarti terjadi peningkatan nilai penjualan dan indeks di bawah 1 berarti terjadi penurunan nilai penjualan. Perkembangan rata-rata index berantai (*Average Linked Index*) pada periode dua triwulan terakhir berfluktuasi cukup tajam. Pada triwulan II-2006 *link index* adalah sebesar 0,92, yang berarti masih mengalami penurunan kembali dibandingkan posisi pada triwulan I-2006 yang sebesar 0,98.

## BOKS - 2

# **Kontribusi Sektor Informal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Medan (Studi Kasus Usaha Dagang Asongan)<sup>3</sup>**

### **III. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada tahap awal Pelita, sektor pertanian hampir menyerap 2/3 jumlah angkatan kerja di Indonesia dan merupakan sumber utama pendapatan nasional. Pada tahap selanjutnya peranan sektor industri dan jasa mengalami kenaikan, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun andilnya pada pendapatan nasional.

Menurut data Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, Bappenas, meskipun pertumbuhan ekonomi selama pembangunan jangka panjang pertama berkisar antara 5%-8% per tahun, proporsi pekerja sektor informal khususnya diperkotaan cenderung meningkat, termasuk di Sumatera Utara. Pada tahun 1971 proporsi pekerja sektor informal terhadap jumlah angkatan kerja di kota sekitar 25%. Angka ini meningkat sekitar 36% pada tahun 1980 dan menjadi 42% pada tahun 1990. Tahun 2000 angka tersebut menjadi sekitar 65%. Hal ini menunjukkan sektor informal masih cukup dominan menyerap angkatan kerja khususnya diperkotaan.

Tumbuh dan berkembangnya sektor informal di berbagai kota seperti halnya di Kota Medan, masih menimbulkan berbagai masalah terutama keberadaan sektor informal masih menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak yang pada umumnya tidak sama. Namun demikian, akibat tumbuh dan berkembangnya sektor informal di suatu kota merupakan gambaran sosial ekonomi dari pola kehidupan masyarakat tersebut. Seberapa besar kontribusi sektor informal terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Medan (studi kasus usaha dagang asongan) masih perlu diteliti keberadaannya.

### **IV. TUJUAN PENELITIAN**

- Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu :
- Untuk mengetahui berapa besar peranan sektor informal dalam menciptakan kesempatan kerja khususnya usaha dagang asongan di Kota Medan.
  - Untuk mengetahui seberapa besar daya serap sektor informal khususnya usaha dagang asongan terhadap angkatan kerja.
  - Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi daya tarik sektor informal

---

<sup>3</sup> Kerja sama Penelitian antara Bank Indonesia Medan dengan Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara

## V. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi terhadap Pemerintah Kota Medan dan Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan selanjutnya, antara lain :

- Dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan terhadap sektor informal khususnya pembinaan dan pengembangan usaha pedagang asongan yang berada di Kota Medan.
- Dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pedagang informal sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut akan pentingnya pembinaan pedagang asongan yang belum banyak disentuh baik oleh pemerintah maupun perbankan.
- Dengan diketahuinya sektor informal maka Bank Indonesia dapat membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor riil.

## VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### IV.1 Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Informal

Sektor informal pedagang asongan sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal pedagang asongan dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah merupakan gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Setidaknya ketika program pembangunan ekonomi kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung atau sebagai alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa aktivitas kegiatan pedagang asongan ini ditinjau dari faktor-faktor pelaku yang mendorong pelaku sektor informal pedagang asongan ditunjukkan oleh model berikut :

$$\text{Log}\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 L_i + \beta_2 E + \beta_3 JW + \beta_4 TLK + u_i$$

Hasil analisis terhadap data diperoleh hasil sebagai berikut :

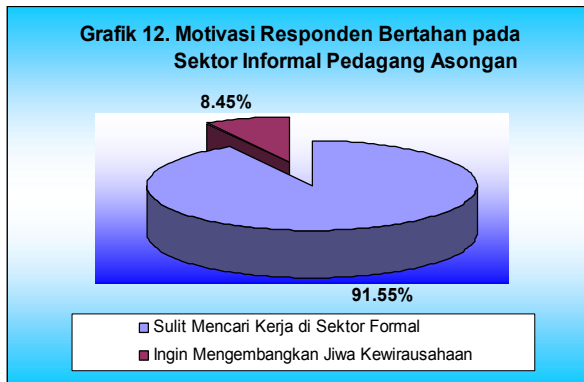
$$\text{Log}\left[\frac{p_i}{1-p_i}\right] = -0,520 + 0,292L_i + 0,052E_i + 0,037W_i + 0,156TLK_i + u_i$$

SE	= (0,107)	(0,078)	(0,087)	(0,078)	(0,085)
t	= (-4,853)	(3,727)	(0,606)	(0,474)	(2,201)
R <sup>2</sup>	= 0,626	F = 6,012			

Berdasarkan hasil model tersebut di atas, menunjukkan bahwa hanya variabel tidak adanya lapangan kerja baru dan lokasi yang sangat mempengaruhi ketahanan pedagang asongan untuk tetap bekerja. Sedangkan faktor pendidikan dan jiwa kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap ketahanan pedagang asongan di sektor tersebut.

## IV.2 Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Sektor Informal Tetap Bertahan.

### a. Aspek Kesulitan Lapangan Kerja



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, diolah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar responden yaitu 58 orang responden (81,69%) tidak ada dan tidak pernah melakukan pengembangan usaha baru. Demikian juga halnya dengan penambahan tenaga kerja setelah adanya penambahan modal sebagian besar responden yaitu 46 orang responden (64,79%) menyatakan tidak ada menambah atau melibatkan tenaga kerja lain akibat adanya

penambahan modal.

Berdasarkan hasil angket yang telah dijawab oleh responden tentang apa motivasi responden untuk tetap bertahan pada sektor informal pedagang asongan, ternyata 65 responden (91,55%) menyatakan bahwa motivasi mereka bertahan pada sektor informal pedagang asongan karena faktor sulitnya mencari lapangan kerja baru di sektor formal, dan hanya 6 orang responden (8,45%) mengatakan bahwa motivasi mereka bertahan dalam sektor informal pedagang asongan karena faktor ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan.

### b. Lokasi Usaha Pedagang Asongan

Lokasi usaha asongan secara signifikan berpengaruh terhadap daya dorong pelaku sektor informal pedagang asongan untuk tetap bertahan dalam sektor ini. Situasi ini menunjukkan bahwa semakin strategis lokasi usaha penjualan pedagang asongan maka pelaku usaha pedagang asongan tersebut akan semakin mampu bertahan untuk tetap bekerja di sektor tersebut. Artinya setiap terjadi perubahan lokasi yang strategis sebesar 1% maka daya dorong pelaku sektor informal pedagang asongan untuk tetap bertahan di sektor tersebut akan meningkat sebesar 29,2%.

### IV.3 Aspek-Aspek yang Tidak Mempengaruhi Sektor Informal Pedagang Asongan Tetap Bertahan.

#### a. Aspek Pendidikan

Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA sebanyak 33 orang responden (46,48%). Secara teori kelompok yang menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA merupakan kelompok penduduk yang relatif besar. Tingginya kelompok tingkat pendidikan SMA ini yang terjun pada sektor informal pedagang asongan memberi indikasi bahwa sektor formal belum mampu menyerap kelompok pendidikan tingkat SMA bekerja di sektor formal. Selain itu, tingginya kelompok pendidikan tingkat SMA yang terjun pada sektor informal pedagang asongan menunjukkan bahwa sulitnya pekerjaan yang di dapat oleh kelompok ini sehingga mengakibatkan lulusan SMA banyak yang terjun ke dalam aktivitas sektor informal pedagang asongan.

#### b. Aspek Jiwa Kewirausahaan

Faktor jiwa kewirausahaan secara teori sangat berpengaruh terhadap perilaku individu untuk tetap bertahan dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan usaha dagang. Dari hasil analisis secara deskriptif dapat ditunjukkan tabel crosstabulation sebagai berikut :

**Tabel 1. Crosstabulation Jiwa Kewirausahaan**

serap \* jiwa\_w Crosstabulation

% of Total		jiwa_w		Total
		tidak jiwa wira	jiwa wira	
serap	-,37	38,5%	30,8%	69,2%
	-,17		7,7%	7,7%
	,09	7,7%	15,4%	23,1%
Total		46,2%	53,8%	100,0%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2006, data diolah

Pada tingkat probabilitas sebesar 69,2% untuk nilai probabilitas sebesar 0,37 faktor yang mendukung penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan jiwa kewirausahaan hanya sebesar 30,8%, sedangkan sisanya sebesar 38,5% tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan tingkat probabilitas sebesar 7,7% untuk nilai probabilitas 0,17, faktor yang mendukung penyerapan tenaga kerja yang terkait dengan jiwa kewirausahaan hanya sebesar 7,7% dan dengan probabilitas sebesar 23,1% untuk nilai probabilitas sebesar 0,09 faktor yang mendukung penyerapan tenaga kerja ini terkait dengan jiwa kewirausahaan sebesar 15,4% dan tidak memiliki jiwa kewirausahaan sebesar 7,7%.

Hal ini menunjukkan bahwa, pedagang asongan yang terjun ke dalam usaha ini secara umum didukung oleh faktor jiwa kewirausahaan sebesar 53,8%, sedangkan sisa tidak didukung oleh jiwa kewirausahaan sebesar 46,2%. Dengan demikian proses alih kerja dari sektor pedagang informal pedagang asongan ini memungkinkan dan dapat terjadi setiap saat serta dapat beralih profesi dari waktu ke waktu.

## **VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **V.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil model probit logit, hanya variabel tidak adanya lapangan kerja baru dan lokasi yang sangat mempengaruhi ketahanan pedagang asongan untuk tetap bekerja. Sedangkan faktor pendidikan dan jiwa kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap ketahanan pedagang asongan di sektor tersebut. Nilai  $R^2$  sebesar 0,626 menunjukkan bahwa variabel daya serap tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel lokasi, tingkat pendidikan, jiwa kewirausahaan dan sulitnya lapangan kerja sebesar 62,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk model ini.
2. Analisis secara deskriptif, menunjukkan bahwa, dari 71 orang responden yang dijadikan sampel, 58 responden (81,69%) menyatakan tidak pernah melakukan pengembangan usaha baru. Demikian pula jika dilihat dari jumlah tenaga kerja yang digunakan, tampak bahwa 46 orang responden (64,79%) menyatakan tidak menambah tenaga kerja, akibat tidak adanya penambahan modal baru.
3. Sebagian besar motivasi responden yaitu 65 orang responden (91,55%) untuk tetap bertahan pada sektor informal pedagang asongan disebabkan oleh sulitnya mencari lapangan kerja pada sektor formal.
4. Tingginya jumlah angkatan kerja yang bekerja pada sektor informal ini disebabkan sektor formal belum mampu menampung seluruh angkatan kerja membuktikan sektor ini merupakan salah satu katub pengaman dalam masalah ketenagakerjaan.

### **V.2 Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus agar sektor informal pedagang asongan tidak memberi masalah terhadap tata kota, sebab sektor ini merupakan alternatif dalam menyerap tenaga kerja akibat belum maksimalnya sektor formal menampung angkatan kerja yang sedang mencari kerja.
2. Hendaknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengapa responden yang terjun pada sektor ini sebagian besar motivasinya hanya karena sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal, bukan karena motivasi ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan, padahal sebagian besar dari responden yang diteliti rata-rata menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SMA.
3. Orientasi kebijakan pengembangan sektor informal memerlukan bentuk intervensi langsung atau tidak langsung. Jika Pemerintah Kota Medan ingin membantu perkembangan sektor informal pedagang asongan tanpa intervensi langsung, maka dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menciptakan suatu lingkungan berusaha (eksternal) yang kondusif bagi perkembangan kegiatan sektor informal pedagang asongan.
4. Hendaknya Pemerintah Kota Medan membuat kebijakan dengan cara melokalisasi pedagang asongan yang selalu berpindah-pindah tempat di tempat-tempat yang strategis, agar keberadaan mereka dapat di data sehingga pemberian bantuan modal dapat lebih terjamin.

## BOKS - 3

# **Pembangunan Bandar Kuala Namu dan Dampak Ekonomi Bagi Sumatera Utara<sup>4</sup>**

### **VIII. PENDAHULUAN**

Bandar udara merupakan jalur yang sudah disiapkan dimana pesawat terbang mendarat dan terbang, bandar udara juga memiliki hanggar dan lain-lain fasilitas pelayanan baik pengisian bahan bakar, tempat pemberhentian pesawat dan memberikan pelayanan kepada penumpang pesawat komersil. PT. (Persero) Angkasa Pura II yang mengelola bandar udara berkedudukan di Cengkareng Jakarta Soekarno – Hatta International secara keseluruhan mengelola 10 (sepuluh) Bandar Udara meliputi beberapa Propinsi di Indonesia salah satunya adalah Bandar Udara Polonia.

Dengan makin meningkatnya arus penumpang di Bandar Polonia pemerintah tidak mungkin menunda pembangunan bandar tersebut mengingat kapasitas Bandar Polonia Medan yang ada saat ini sudah kurang memadai. Tidak mungkin terus mempertahankan Bandar Polonia dengan jumlah penumpang yang terus membludak sehingga target pemerintah menyelesaikan bandar baru Kuala Namu Sumatera Utara sebagai pengganti Polonia bisa tercapai sesuai dengan target yaitu pada tahun 2010. Angka pertumbuhan penumpang melalui Bandar Internasional Polonia Medan cukup tinggi, yaitu dari 900.000 penumpang, tahun 2001, melonjak hingga 4 juta penumpang di tahun ini. Sementara kapasitas yang tersedia sekitar 2 juta penumpang. Penerbangan komersial mempunyai peran sangat besar dalam pengembangan trade, tourism, and investment (TTI).

### **IX. Sasaran**

Sasaran kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa jauh manfaat Bandar Udara Kuala Namu bagi perkembangan perdagangan di Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui peranan Bandar Udara Kuala Namu bagi Investasi.
3. Untuk mengetahui manfaat Bandar Udara Kuala Namu bagi wisatawan domestik dan mancanegara
4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja dalam pembangunan Bandar Kuala Namu

### **X. Metodologi**

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Polonia dan Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang sebagai rencana daerah Bandar Udara serta wilayah Sumatera Utara umumnya. Populasi dari penelitian ini adalah

---

<sup>4</sup> Kerja sama Penelitian antara Bank Indonesia Medan dengan Universitas Medan Area (UMA)



pengusaha atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, Industri (investasi) dan pariwisata sehingga akan memberikan gambaran tentang persepsi dan ekspektasi dari pelaku bisnis dengan keadaan bandar udara. Penelitian ini banyak menggunakan data-data sekunder dengan mengkaji data-data yang lampau untuk memprediksi dampak yang akan terjadi dengan pembangunan Bandar Udara Kuala Namu. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara serta pengumpulan data sekunder Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan Pearson's Product Moment untuk memberikan gambaran-gambaran peranan bandar Polonia dari tahun 1990 hingga tahun 2005. Untuk persepsi dan peranan Bandar Kuala Namu pada masa yang akan datang menggunakan kuesioner dengan Skala Likert sehingga akan diketahui persepsi dan ekspektasi dari pengusaha atau perusahaan di Sumatera Utara. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Propinsi Sumatera Utara digunakan metode Cobb-Douglas sekaligus memakai analisis regresi trend untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja.

## **XI. Hasil dan Pembahasan**

Pertumbuhan jumlah penumpang baik yang datang maupun berangkat melalui Bandar Udara Polonia terus meningkat. Pada tahun 1990 hingga tahun 1996 pertumbuhan jumlah penumpang cenderung naik. Namun pada tahun 1997 sampai 2000 pertumbuhan penumpang mengalami penurunan hingga 40%. Setelah tahun 2000 pertumbuhan penumpang kedatangan kembali naik sampai 60% sehingga jumlah penumpang domestik mencapai 4 juta pada tahun 2004 dan 2005.

Dari tahun 2000-2005 dapat dilihat bahwa lebih banyak bongkar daripada muat untuk kargo domestik berdasarkan beratnya. Namun sebelum krisis moneter bongkar muat barang menunjukkan angka yang positif. Sejak tahun 2000 setelah krisis moneter pertumbuhan bongkar muat naik secara signifikan. Bongkar barang meningkat dari tahun 2000 sebesar 8.282.228 kg menjadi 17.812.094 kg pada tahun 2005. Muat barang juga meningkat dari tahun 2000 sebesar 5.738.645 menjadi 5.738.645 pada tahun 2005. Setelah krisis ekonomi yaitu pada tahun 2000 nilai ekspor terus menerus turun demikian pula nilai impor juga terus turun. Ekspor turun dari 22.563.000 USD turun menjadi 12.791.000,- USD pada tahun 2004. Impor juga turun dari 9.720.000 USD (2000) menjadi 3.772.000,- USD (2004)

Untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel menyangkut kegiatan bandara dengan kegiatan ekonomi di Propinsi Sumatera Utara digunakan Analisis Koefisiensi Korelasi (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient). Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara jumlah penumpang dalam negeri dengan barang kargo dalam negeri (Bongkar Kg) yaitu sebesar 0,9304. Namun Korelasi Jumlah Penumpang Dalam Negeri dengan Barang kargo Dalam Negeri (Muat Kg) menunjukkan hubungan yang sangat lemah yaitu sebesar 0,2454.

Demikian pula dengan korelasi jumlah penumpang dari luar negeri dengan barang kargo luar negeri (Bongkar Kg) menunjukkan hubungan yang cukup kuat yaitu 0,9484. Korelasi jumlah penumpang ke luar negeri dengan barang kargo luar negeri (Muat Kg) berdasarkan perhitungan Analisis Koefisiensi Korelasi (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) menunjukkan hubungan yang kuat yaitu sebesar 0,6499.

Korelasi Jumlah Penumpang Luar Negeri dengan Barang Kargo Ekspor (FOB USD) Dari perhitungan Analisis Koefisiensi Korelasi hubungan jumlah penumpang luar negeri (keberangkatan) dengan barang kargo luar negeri (FOB USD) adalah kuat yaitu sebesar 0,429. Sedangkan dari perhitungan Analisis Koefisiensi Korelasi (hubungan jumlah penumpang luar negeri (Kedatangan) dengan barang kargo luar negeri (CIF USD) adalah sangat kuat yaitu 0,551.

Jumlah penumpang yang terus meningkat seharusnya memberikan kontribusi pada sektor lainnya seperti sektor Penanaman Modal baik PMDN maupun PMA. Namun untuk PMA tidak mempunyai hubungan sama sekali yaitu sebesar -0,2865. Hal ini terjadi karena tingkat investasi PMA terus menerus menurun semenjak krisis moneter sedangkan hubungan dengan tingkat PMDN terdapat hubungan yang lemah yaitu 0,4987.

Pada saat ini jumlah wisatawan mancanegara terus menurun sejak tahun krisis moneter. Sementara jumlah penumpang internasional terus menerus naik. Dari perhitungan Analisis Koefisiensi Korelasi (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) hubungan jumlah penumpang internasional dengan wisatawan mancanegara memiliki hubungan yang lemah yaitu sebesar 0,3200. Sedangkan hubungan antara jumlah penumpang dengan tingkat hunian hotel memiliki hubungan yang sangat lemah yaitu sebesar 0,04188. Ini berarti jumlah kenaikan penumpang di Bandar Udara Polonia tidak memiliki hubungan dengan tingkat hunian hotel bintang 1 hingga bintang 5.

Hasil pengolahan data dari model fungsi produksi Cobb-Douglas dengan menggunakan data kapital berupa penjumlahan investasi PMA dan PMDN yang ada di Sumatera Utara bahwa R-square mencapai 94,7% artinya secara teori kedua variabel yaitu capital dan labour dapat menjelaskan secara serentak tentang perubahan total output dalam hal ini adalah PDB, sisanya 5,3% dipengaruhi oleh variabel diluar model, sedangkan untuk melihat pengaruh adalah R dengan nilai 97,3% bahwa secara simultan variabel modal dan tenaga kerja dapat mempengaruhi PDB yang dihasilkan. Adapun Variabel modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif pada tingkat signifikansi sebesar 10%, sedangkan variabel tenaga kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif pada signifikansi 5%. Dengan kata lain kedua variabel memiliki pengaruh terhadap pembentukan output, yang berarti adanya penyerapan tenaga kerja. Melalui analisa regresi tren antara tenaga kerja dengan waktu, ternyata trennya mencapai angka 1,26%. Artinya setiap tahun akan ada peningkatan jumlah tenaga kerja yang akan diserap dalam aktivitas ekonomi di Propinsi Sumatera Utara sebesar 1,26%. Dengan demikian penyerapan kesempatan kerja akan sebesar 69.478 orang dan karena proyek ini berlangsung di Kabupaten Deli maka penyerapannya diharapkan lebih banyak di kabupaten tersebut.

## **XII. Kesimpulan**

1. Dari hasil kuesioner menunjukkan hasil yang tidak terlampau optimis tentang pembangunan Bandar Udara Kuala Namu karena Bandar Udara Polonia masih dapat memenuhi kebutuhan bisnis mereka karena tidak ada hambatan yang berarti dalam bisnis mereka. Hasil survei menunjukkan keberadaan Bandar Udara Polonia masih memadai untuk barang kargo tetapi tidak untuk penumpang sebagai Bandar Internasional.
2. Dengan akan berdirinya Bandar Udara Kuala Namu yang memiliki kapasitas yang lebih besar dikhawatirkan dapat menyedot WNI keluar negeri apalagi makin banyaknya penerbangan keluar negeri. Berdasarkan survei pihak pengelola wisata menghendaki Bandar Udara Polonia segera dipindahkan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara.
3. Dengan pembangunan Bandar Kuala Namu jumlah tenaga kerja yang akan diserap dalam aktivitas ekonomi di Propinsi Sumatera Utara diperkirakan sebesar  $\pm 69.000$ .

## **XIII. Saran**

1. Dari hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan hanya pada sektor arus penumpang dalam negeri naik cukup tajam dan penumpang luar negeri kenaikan penumpang luar negeri masih sedikit. Oleh karena itu pemerintah harus membuka atau menambah jalur penerbangan Internasional tidak sebatas Medan Malaysia dan Singapura. Sehingga Bandar Kuala Namu dapat menjadi Bandar Udara transit penerbangan Internasional.
2. Karena Bandar Polonia lebih banyak menerima barang kargo bongkar dibanding dengan barang muat secara domestik maka diharapkan dengan dibukanya Bandar Kuala Namu akan mempermudah arus barang dari Sumatera Utara ke daerah lainnya. Pemerintah daerah harus membuka hubungan perdagangan Internasional.
3. Dengan dibukanya lebih banyak penerbangan Internasional maka pemerintah harus dapat merangsang pertumbuhan ekspor dengan memudahkan fasilitas arus barang dan jasa melalui regulasi perdagangan bebas. Sehingga arus ekspor dapat ditingkatkan di Bandar yang baru. Dengan demikian keberadaan Bandar Kuala Namu tidak hanya melayani penumpang yang terus menerus meningkat.
4. Dengan berdirinya Bandar Kuala Namu pemerintah harus lebih banyak mempromosikan wisata di wilayah Sumatera dan Sumatera Utara khususnya ditingkat Internasional sehingga arus wisatawan mancanegara akan lebih banyak datang ke Indonesia.
5. Pihak pengelolaan harus menghilangkan biaya tinggi dengan menghilangkan percaloan dan premanisme di Bandar yang saat ini terjadi di Bandar Polonia yang dikeluhkan oleh wisatawan mancanegara dan domestik.
6. Dengan dibangunnya Bandar Udara Kuala Namu pihak pelaksana pembangunan harus lebih banyak menggunakan tenaga kerja lokal sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja disektor lain. Tidak seperti proyek-proyek lain yang selama ini yang masih mendatangkan pekerja baik skill dan non skill dari luar daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Deli Serdang terdapat supply tenaga kerja yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut.

## BAB II

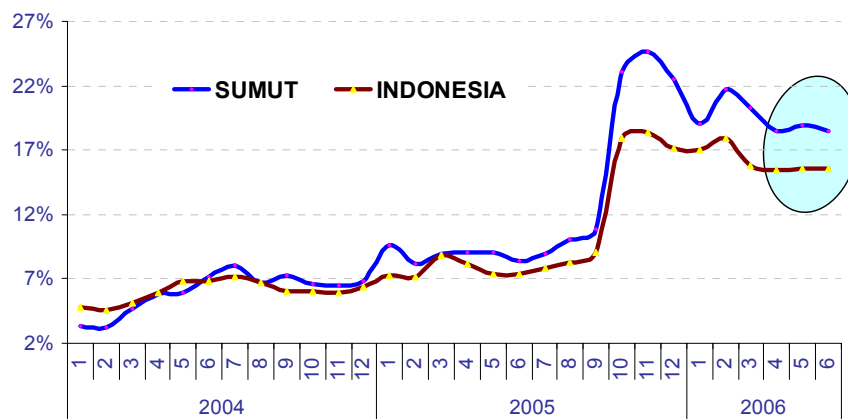
# PERKEMBANGAN INFLASI SUMATERA UTARA

### 2.1 Kondisi Umum

Perkembangan tingkat harga secara umum di Sumatera Utara pada triwulan II tahun 2006 terus bergerak membaik dan mencatat inflasi yang cukup rendah. Hingga posisi Juni 2006, inflasi tahunan Sumut (*year on year*) adalah sebesar 18,43%, menurun dibandingkan posisi triwulan I tahun 2006 yang lalu yang sebesar 20,24%. Pada bulan April, Sumut mencatat deflasi sebesar 0,47% yang terjadi di seluruh kota perhitungan inflasi. Pada bulan Mei 2006, inflasi yang terjadi sebesar 0,63%, atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 0,37%. Sementara pada bulan Juni, inflasi yang terjadi relatif rendah yakni sebesar 0,18%. Kondisi tersebut menyebabkan angka inflasi selama triwulan II berada pada level yang cukup rendah yakni sebesar 0,56% (qtq).

Secara akumulatif, inflasi Sumut hingga posisi Juni 2006 adalah sebesar 1,49%, masih cukup rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,87%. Rendahnya angka inflasi tersebut terutama terjadi di Sibolga yang mencatat deflasi sebesar 1,35%. Sedangkan kota perhitungan inflasi Sumut yang mengalami tekanan inflasi terbesar terjadi di kota Padang Sidempuan yakni sebesar 2,06%. Kota Medan yang memiliki kontribusi bobot terbesar hanya mencatat inflasi sebesar 1,70%.

**Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Nasional dan Sumatera Utara**



## 2.2 Inflasi Sumut

Meskipun tidak terjadi ledakan peningkatan permintaan yang signifikan seiring dengan **Construction booming** yang terjadi di provinsi NAD, namun *gencarnya aktivitas pembangunan fisik perumahan dan sarana publik yang tengah berlangsung cukup meningkatkan permintaan komoditas kelompok barang perumahan sehingga mendorong kenaikan harga komoditas tersebut*. Bagi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) maupun LSM yang merupakan kepanjangan tangan asing *Non Governmental Organization (NGO)* mungkin kenaikan tersebut tidak terlalu bermasalah karena mereka memiliki dana yang besar. Namun hal ini menyulitkan bagi penduduk aceh yang berdomisili di daerah yang tidak terkena tsunami di Banda Aceh dan Lhokseumawe yang ingin merehab rumah/tokonya. Tingginya permintaan bahan bangunan oleh BRR atau NGO menyebabkan pasokan bahan bangunan di daerah yang tidak kena tsunami menjadi sedikit karena banyak dikirim ke banda aceh atau melaboh, sehingga harga barang naik.

Kecenderungan peningkatan harga barang di kota Medan juga terlihat dari beban produksi yang semakin tinggi pasca **kenaikan harga BBM industri** tanggal 1 Juni yang lalu. Sebagai respon dari kenaikan tersebut, *pihak pengelola pusat perbelanjaan Mall di Medan menaikkan tarif service charge sebesar 10%. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh pemadaman listrik bergilir yang terus berlangsung sehingga pengusaha harus mengeluarkan biaya operasional lebih untuk operasional genset*.

Tingginya harga solar pasca kenaikan BBM turut memukul sub sektor perikanan yang pada akhirnya mendorong harga hasil produksi perikanan bergerak naik. Pada triwulan laporan, khususnya di bulan Mei terlihat bahwa beberapa komoditi ikan segar dan ikan yang diawetkan kembali mengalami peningkatan harga. *Untuk wilayah Lhokseumawe, rendahnya produksi hasil perikanan juga dipengaruhi buruknya cuaca di pesisir pantai timur yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut*.

Penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah oleh Pertamina sebesar Rp2.250 ternyata tidak mampu mengendalikan harga minyak tanah di lapangan. Baik di Medan hingga Lhokseumawe masih banyak pangkalan minyak tanah yang menjual dengan harga di atas HET. *Penjualan minyak tanah di atas HET hampir terjadi merata di seluruh kawasan kota Medan dengan kisaran harga antara*

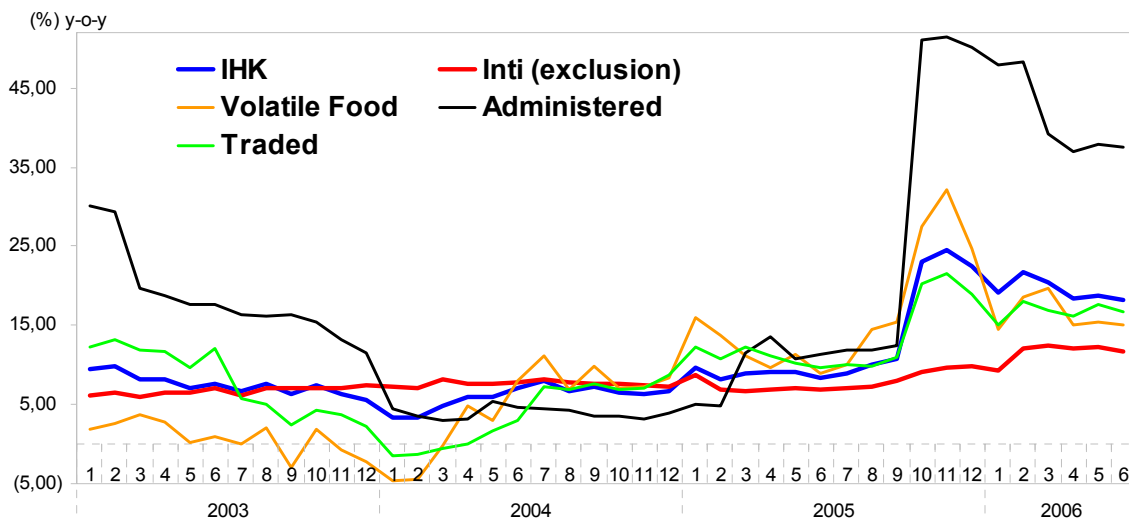
*Rp2.500 – Rp3.000 per liter dari warung-warung.* Bahkan **kelangkaan minyak tanah** yang cukup parah terjadi di Lhokseumawe dan Sabang yang memaksa sebagian besar masyarakat untuk mengantri demi mendapatkan jatah penjualan minyak tanah.

Ancaman **penyebaran virus flu burung** yang terus terjadi di wilayah provinsi Sumatera Utara telah menyebabkan berkurangnya pasokan ternak di pasaran. *Salah satu wilayah yang cukup parah terjangkiti ancaman virus ini adalah kabupaten Karo yang rencananya akan memusnahkan unggas ternak atau piaraan pada wilayah-wilayah yang terkena virus flu burung di kabupaten Karo.*

### 2.3. Disagregasi Inflasi

Berdasarkan disagregasi inflasi pada triwulan II, terlihat bahwa inflasi seluruh komponen disagregasi mengalami trend yang sejalan, yakni dengan penurunan pada bulan April dan peningkatan kembali pada bulan Mei, sementara bulan Juni ditandai dengan inflasi yang relatif rendah. Penurunan yang terjadi hingga bulan Juni terutama dipicu oleh komoditas *volatile food* dengan mencatat inflasi tahunan (yoy) sebesar 15,02% dari 19,69% pada triwulan sebelumnya, disusul *administered price* yang menurun menjadi sebesar 37,49% dari 39,11%. Sementara pada kelompok barang *traded*, tekanan inflasi relatif masih terjadi yakni dengan hanya mencatat penurunan tipis dari triwulan sebelumnya yakni dari sebesar 16,85% menjadi 16,73%.

**Grafik 2.2 Disagregasi Inflasi**

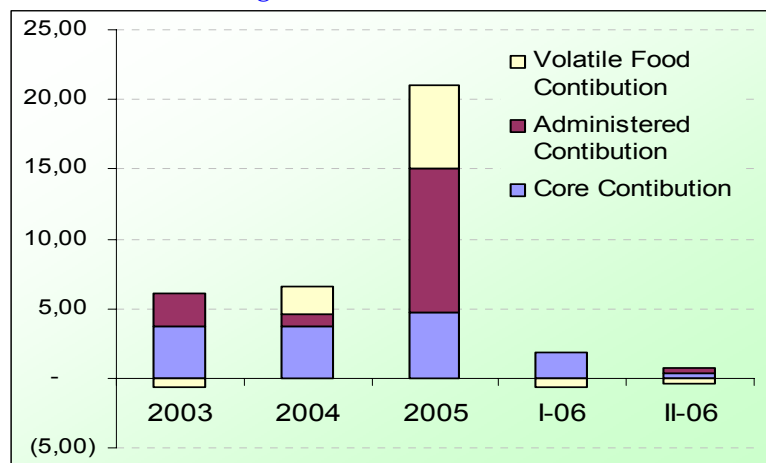


## **Inflasi Inti**

Inflasi Inti secara tahunan dengan menggunakan metode *exclusion* bergerak relatif stabil yakni dari 12,39% (yoy) pada triwulan I menjadi 11,72% pada triwulan II (Juni 2006).

Berdasarkan sumbangannya tekanan pada inflasi inti pada triwulan kedua tahun 2006 masih cukup dominan. Kelompok komoditas *volatile food* sedikit meningkat yang ditandai oleh kenaikan harga bahan makanan pada bulan Mei, sementara komoditas *administered price* yang pada triwulan I lalu tidak memberikan tekanan yang berarti mulai memberikan sedikit tekanan pada triwulan laporan.

Grafik 2.3 Sumbangan Inflasi Inti, Volatile & Administered



## **2.4. Inflasi Kelompok Barang**

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, inflasi tertinggi pada triwulan II tahun 2006 di dorong oleh kenaikan pada kelompok barang sandang, kesehatan, dan perumahan, air, listrik, gas dan air minum masing-masing sebesar 3,62%, 1,15%, dan 1,00%. Sementara kelompok bahan makanan yang merupakan kelompok penyumbang terbesar inflasi justru mengalami deflasi sebesar 1,17%.

Pada triwulan II, secara umum hampir seluruh kelompok barang mencatat inflasi yang sangat rendah. Bahkan kelompok bahan makanan kembali mengalami

deflasi secara berturut-turut yakni sebesar 1,17%. Deflasi yang terjadi terutama disebabkan periode musim panen yang masih terjadi pada bulan April di beberapa lumbung padi. Kondisi tersebut juga menurunkan kembali gejolak harga yang terjadi pada pertengahan triwulan I yang lalu.

**Tabel 2.1. Inflasi Kelompok Barang Triwulanan Periode Trw. II-2006 Sumut**

KELOMPOK BARANG	II-05	IV-05	I-06	II-06
BAHAN MAKANAN	2,32	14,00	(2,82)	(1,17)
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	1,02	4,35	1,59	0,70
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	1,89	9,29	6,29	1,00
SANDANG	0,73	3,93	1,13	3,62
KESEHATAN	2,82	1,61	5,72	1,15
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	0,24	(2,43)	1,33	0,26
TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	2,97	43,00	0,07	0,35
<b>SUMUT</b>	<b>1,91</b>	<b>13,47</b>	<b>1,15</b>	<b>0,34</b>

*Sumber : BPS, diolah*

Beberapa komoditas yang mengalami inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan dan sandang. Komoditas pada kelompok bahan makanan antara lain daging ayam ras dan daging babi, ikan tenggiri, tongkol dan ikan kembung asin, kentang, kembang kol, nangka muda dan kol, jeruk, pir dan tomat buah, serta bawang merah dan bawang putih. Sementara komoditas pada kelompok sandang terutama terjadi pada emas perhiasan, kaos t-shirt, dan topi.



**BOKS - 4**  
**DETERMINAN INFLASI SUMATERA UTARA**  
**SEMESTER I TAHUN 2006**

**XIV. Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang**

Inflasi kelompok barang menurut sumbangannya selama semester I dapat dilihat melalui kontribusinya selama enam bulan periode laporan (Januari-Juni). Secara umum tekanan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari dan Mei, sementara yang terendah terjadi pada bulan Januari dan April.

**Tabel 1. Sumbangan Inflasi Kelompok Barang Sumut**

KELOMPOK BARANG	Jan-06	Feb-06	Mar-06	I-06	Apr-06	Mei-06	Jun-06	II-06
1. BAHAN MAKANAN	(0,83)	(0,18)	0,16	(0,84)	(0,65)	0,18	0,14	(0,33)
2. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	(0,00)	0,10	0,14	0,23	0,03	0,05	0,02	0,10
3. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	0,54	0,81	0,10	1,45	0,09	0,12	0,03	0,24
4. SANDANG	0,02	0,03	0,01	0,06	0,05	0,22	(0,08)	0,20
5. KESEHATAN	0,14	0,02	0,05	0,22	0,03	(0,00)	0,02	0,05
6. PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,01
7. TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	(0,04)	0,05	0,00	0,01	0,00	0,05	0,02	0,06
<b>Sumut</b>	<b>(0,11)</b>	<b>0,84</b>	<b>0,46</b>	<b>1,20</b>	<b>(0,47)</b>	<b>0,63</b>	<b>0,18</b>	<b>0,34</b>

Sumbangan inflasi berdasarkan kelompok barang diwakili oleh 7 kelompok. Berdasarkan perkembangan tingkat harga selama semester I tahun 2006, kelompok barang Perumahan, air, listrik, gas dan air minum merupakan penyumbang terbesar dengan sumbangan inflasi sebesar 1,45% pada triwulan I dan 0,24 pada triwulan II. Sedangkan kelompok barang makanan merupakan satu-satunya yang mencatat deflasi baik pada triwulan I sebesar -0,84 serta pada triwulan II sebesar -0,33%. (Tabel 1)

Tingginya kontribusi kelompok barang perumahan terhadap inflasi Sumatera Utara juga dapat dilihat dari perkembangan harga per komoditi selama semester I (Januari-Juni). (Tabel 2). Kelompok barang perumahan tersebut diwakili oleh komoditi sewa rumah, tarif air minum, kontrak rumah, kayu balokan, papan, dan upah pembantu. Sedangkan komoditi yang mengalami deflasi terutama didominasi kelompok barang bahan makanan seperti cabe merah, ikan tongkol, dencis, bawang merah, cabe hijau, hingga kacang panjang.

**Tabel 2. Komoditi Penyumbang Terbesar Inflasi Semester I - 2006**

No	Komoditi	I'06	Kelompok Brg.	No	Komoditi	I'06	Kelompok Brg.
1	Sewa Rumah	1,24	Perumahan	1	Cabe Merah	(1,71)	Bahan Makanan
2	Beras	1,07	Bahan Makanan	2	Tongkol	(0,13)	Bahan Makanan
3	Tarif Air Minum PAM	0,18	Perumahan	3	Dencis	(0,10)	Bahan Makanan
4	Emas Perhiasan	0,17	Sandang	4	Bawang Merah	(0,10)	Bahan Makanan
5	Daging Ayam Ras	0,17	Bahan Makanan	5	Cabe Hijau	(0,10)	Bahan Makanan
6	Bawang Putih	0,16	Bahan Makanan	6	Telur Ayam Ras	(0,07)	Bahan Makanan
7	Kontrak Rumah	0,12	Perumahan	7	Sawi Hijau	(0,07)	Bahan Makanan
8	Jeruk	0,11	Bahan Makanan	8	Mas	(0,06)	Bahan Makanan
9	SLTA	0,10	Pendidikan	9	Kelapa	(0,06)	Bahan Makanan
10	Dokter Spesialis	0,07	Kesehatan	10	Cabe Rawit	(0,06)	Bahan Makanan
11	Kayu Balokan	0,06	Perumahan	11	Lele	(0,04)	Bahan Makanan
12	Rokok Kretek	0,05	Makanan Jadi	12	Ikan Asin Belah	(0,04)	Bahan Makanan
13	Papan	0,05	Perumahan	13	Sawi Putih	(0,04)	Bahan Makanan
14	Tarif Gunting Rambut	0,05	Kesehatan	14	Besi Beton	(0,04)	Perumahan
15	Dokter Umum	0,05	Kesehatan	15	Bayam	(0,04)	Bahan Makanan
16	Nasi	0,04	Bahan Makanan	16	Sekolah Dasar	(0,03)	Pendidikan
17	Upah Pembantu RT	0,04	Perumahan	17	SLTP	(0,03)	Pendidikan
18	Udang Basah	0,04	Bahan Makanan	18	Daging Sapi	(0,03)	Bahan Makanan
19	Bimbingan Belajar	0,04	Pendidikan	19	Aso-Aso	(0,03)	Bahan Makanan
20	Bedak	0,03	Kesehatan	20	Kacang Panjang	(0,02)	Bahan Makanan

## XV. Determinan Inflasi

**Grafik 1. Faktor Determinan Inflasi Sumut Semester I – 2006**

### SISI PENAWARAN :

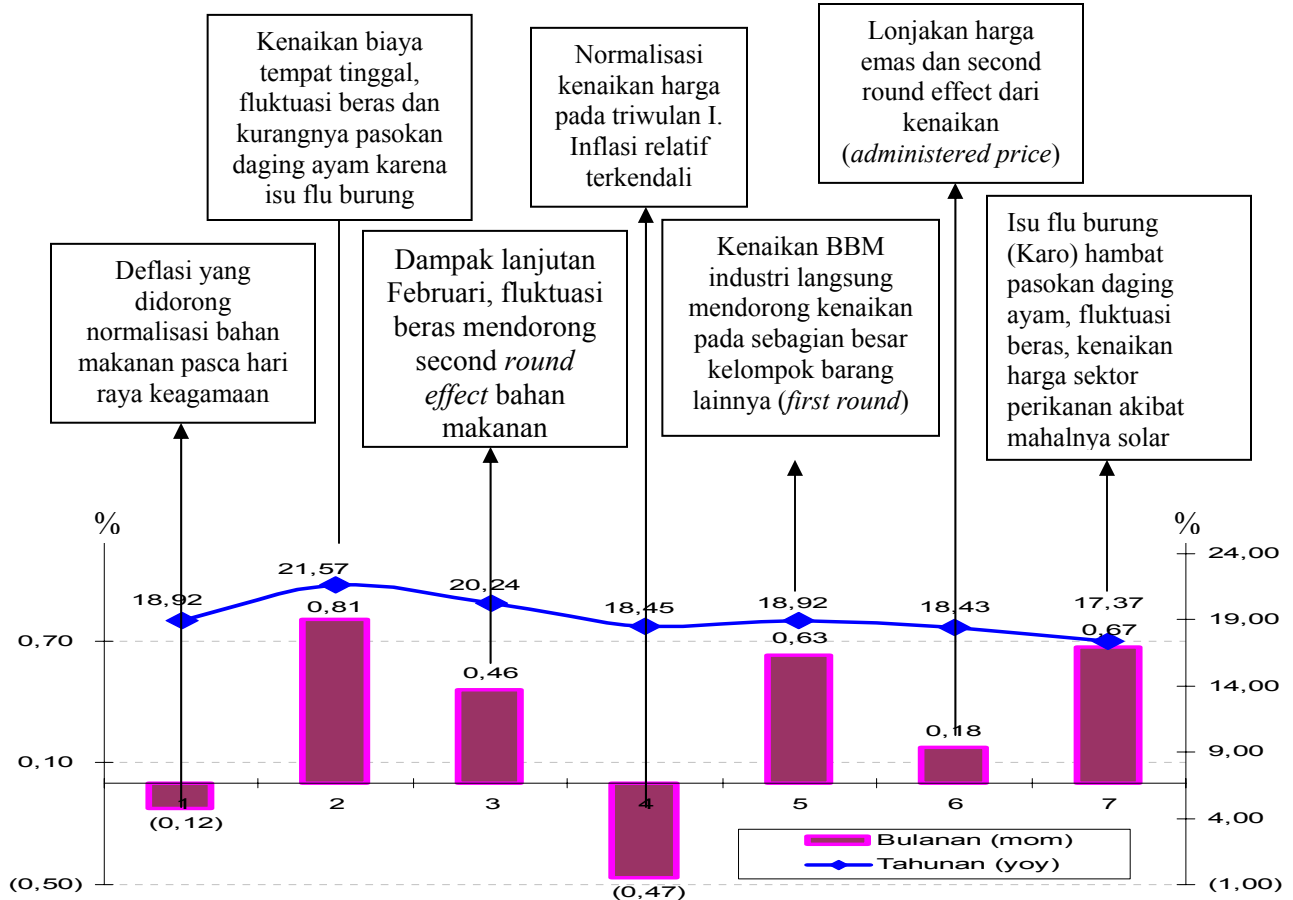
- Regional Supplier Effect : ➡ Construction booming
- Infrastruktur ➡ Distribusi Barang, ongkos angkut
- Kecukupan Pasokan ➡ Volatilitas makanan, gagal panen, flu burung

### SISI PERMINTAAN :

- Administered Price ← Kebijakan Makroekonomi -
- Ekspektasi Harga ← Ekspektasi Konsumen -
- Tahun Baru, Liburan Sekolah ← Faktor Musiman -
- Traded Good ← Perdagangan Internasional -

Berdasarkan perkembangan komoditi yang menyebabkan inflasi dan deflasi tersebut, kita dapat mengeksplorasi beberapa faktor yang menentukan (determine) inflasi provinsi Sumatera Utara selama semester I tahun 2006. Dari sisi Penawaran (cost push), tekanan inflasi terutama disebabkan oleh naiknya permintaan dan kondisi provinsi NAD yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi terhadap intensitas pembangunan fisik seperti perumahan dan sarana publik lainnya. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendorong *construction booming* di NAD memang tidak secara signifikan meningkatkan permintaan pasokan barang di Sumut, namun baik secara langsung ataupun tidak langsung tetap mendorong kenaikan barang-barang yang terkait, khususnya pada kelompok barang perumahan. Faktor lain yang menyebabkan tekanan inflasi juga datang dari volatilitas bahan makanan pokok seperti beras, berkurangnya pasokan daging ayam akibat flu burung.

**Grafik 1. Faktor Determinan Inflasi Bulanan Sumut Semester I - 2006**



## BOKS - 5 **SURVEI KONSUMEN** **TRIWULAN II TAHUN 2006**

### **XVI. LATAR BELAKANG**

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik dalam arti pengendalian inflasi maupun nilai tukar. Untuk menyusun kebijakan, dibutuhkan informasi antara lain mengenai perkembangan permintaan dan penawaran pada sektor riil. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membangun indikator yang mencerminkan tendensi permintaan masyarakat seperti kondisi ekonomi saat ini, ekspektasi terhadap kondisi ekonomi dan ekspektasi terhadap harga menurut konsumen.

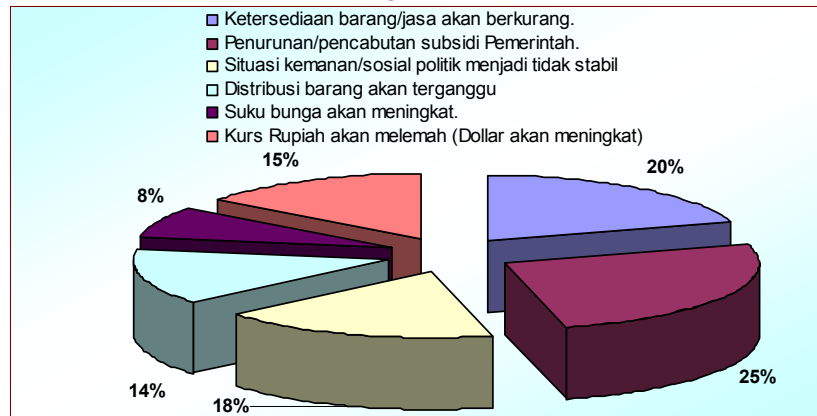
Secara teoritis diyakini bahwa persepsi atau keyakinan dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi akan mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Dengan memperhatikan perilaku konsumsi masyarakat maka dapat diperkirakan perkembangan perekonomian dan tekanan harga (inflasi), sehingga akan membantu mengantisipasi sumber-sumber potensial tekanan inflasi. Indikasi terhadap keyakinan dan ekspektasi masyarakat itu lah yang diharapkan dapat diketahui melalui Survei Konsumen ini.

### **XVII. HASIL SURVEI**

#### **A. Kondisi Ekonomi**

Berdasarkan hasil survei konsumen pada triwulan laporan, ekspektasi kenaikan harga masih mendominasi persepsi masyarakat. Secara umum, beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya ekspektasi kenaikan harga di masyarakat disebabkan beberapa alasan yang tersebar cukup merata, antara lain pengaruh penurunan/pencabutan subsidi oleh pemerintah yakni sebesar 25,82%, disusul kurangnya ketersediaan pasokan barang dan jasa sebesar 20,24%, ketidakstabilan situasi keamanan dan politik sebesar 17,85%, pelemahan kurs rupiah sebesar 14,74%, terganggunya distribusi barang sebesar 13,71% dan peningkatan suku bunga 7,65%. Persepsi responden yang masih menempatkan pencabutan subsidi oleh pemerintah sebagai faktor utama pendorong inflasi Sumatera Utara merupakan gejala psikologis yang membuktikan bahwa kelompok barang *administered price* relatif lebih sensitif terhadap tingkat harga.

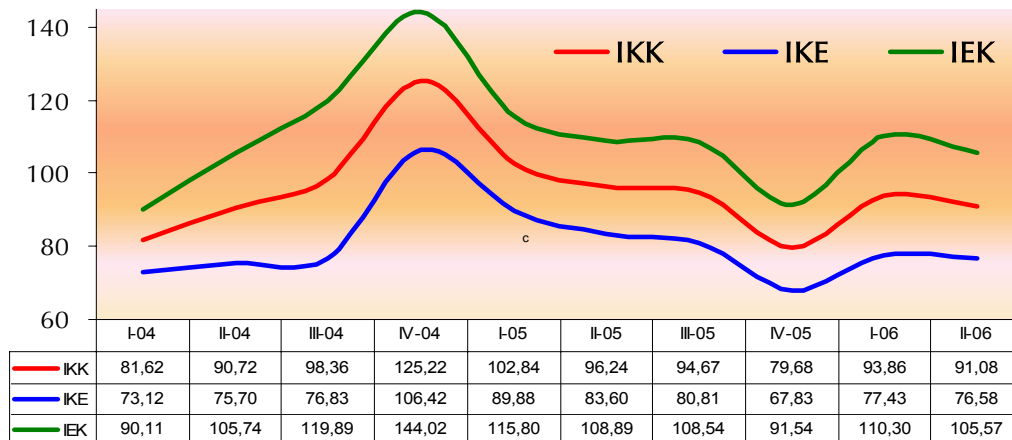
**Grafik 3.1 Keyakinan Konsumen**



**B. Indeks Keyakinan Konsumen**

Survei konsumen untuk triwulan II tahun 2006 yang ditunjukkan ketiga indikator utamanya yaitu Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK) menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. (Grafik 3.2).

**Grafik 3.2 Keyakinan Konsumen**



IKK menurun tipis dari 93,86 menjadi 91,08, sementara IEK dan IKE juga menurun tipis masing-masing dari sebesar 77,43 dan 110,30 menjadi 76,58 dan 105,57 pada triwulan laporan.

Sebagian besar responden masih beranggapan bahwa baik kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja hingga kondisi ekonomi 6 bulan yang akan datang belum akan mengalami perubahan yang signifikan, sementara indeks rata-rata triwulan yang bergerak positif hanya terjadi pada keyakinan masyarakat untuk membeli komoditi tahan lama yang meningkat dari 50,2 menjadi 58,1.

# BAB III

## PERKEMBANGAN PERBANKAN, MONETER DAN SISTEM PEMBAYARAN

### 3.1 PERKEMBANGAN PERBANKAN SUMUT

#### 3.1.1 Perkembangan Bank Umum

Hingga triwulan II - 2006 perkembangan bank umum di Sumatera Utara pada umumnya menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari pertumbuhan Asset, kredit dan DPK serta Laba/Rugi dibandingkan tahun 2005 yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,96%, 3,44% dan 1,69% serta 17,19%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2006 maka laju pertumbuhan indikator tersebut tampaknya semakin cepat kecuali pertumbuhan Laba/Rugi yang cenderung menurun. Penurunan pertumbuhan Laba/Rugi tersebut disebabkan oleh dorongan biaya yang semakin meningkat terutama pengeluaran Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) yang membengkak akibat meningkatnya jumlah *non performing loan* (NPL). Pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan semakin baik tercermin dari *loan to deposit ratio* (LDR) yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Umum  
(Nominal dalam Triliun Rupiah)

Indikator	2004	2005	2006			
			Nominal		Pertumbuhan	
			I	II	I	II
<b>I. Kegiatan Usaha</b>						
- Asset	51.12	62.14	63.44	64.60	2.09%	3.96%
- Kredit	26.25	35.14	35.37	36.35	0.65%	3.44%
- DPK	45.20	52.09	52.10	52.97	0.02%	1.69%
- Laba/Rugi	2.03	1.92	2.40	2.25	25.00%	17.19%
<b>II. Fungsi Intermediasi</b>						
- LDR	58.08%	67.46%	67.89%	68.62%	-	-
<b>III. Non Performing Loan (NPL-gross)</b>						
- Nominal	<b>0.79</b>	<b>3.29</b>	<b>3.37</b>	<b>3.91</b>	2.43%	18.84%
- Persentase	3.01%	9.36%	9.53%	10.76%	-	-

#### 3.1.2 Intermediasi Perbankan

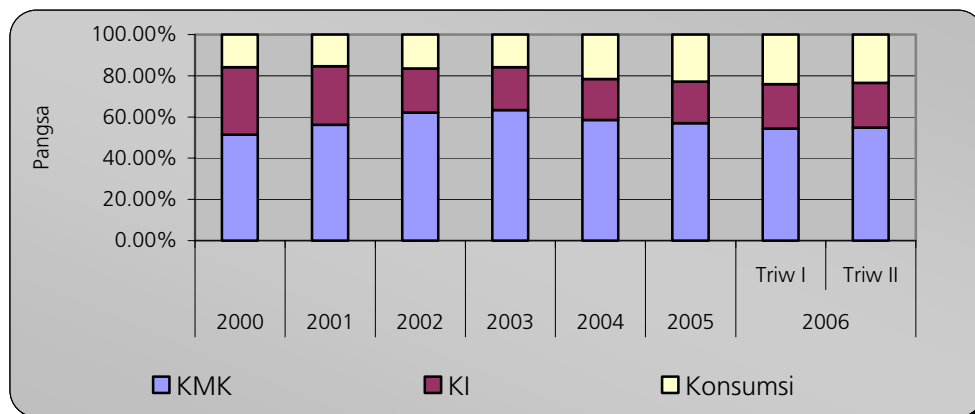
Perkembangan perkreditan perbankan terus mengalami pertumbuhan yang positif, dilihat dari jenis penggunaan kredit maka pertumbuhan kredit investasi meningkat cukup signifikan kemudian diikuti kredit konsumsi sedangkan kredit modal kerja masih tumbuh negatif akibat penurunan permintaan kredit properti.

**Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Menurut Penggunaan  
(Nominal dalam Triliun Rupiah)**

Indikator	2004	2005	2006		Pertumbuhan	
			Triw	Triw	2006	
			I	II	I	II
KMK (Nom)	15.35	20	19.24	19.91	-3.80%	-0.45%
- Share	58.48%	56.92%	54.40%	54.77%		
KI (Nom)	5.25	7.12	7.61	7.93	6.88%	11.38%
- Share	20.00%	20.26%	21.52%	21.82%		
Konsumsi (nom)	5.65	8.02	8.52	8.51	6.23%	6.11%
- Share	21.52%	22.82%	24.09%	23.41%		
<b>Total (Nom)</b>	<b>26.25</b>	<b>35.14</b>	<b>35.37</b>	<b>36.35</b>	<b>0.65%</b>	<b>3.44%</b>

Dilihat dari pangsa kredit menurut jenis penggunaan, maka kredit Kredit Modal Kerja (KMK) masih dominan dibandingkan dengan jenis penggunaan Kredit Investasi (KI), namun demikian perkembangannya semakin menurun. Pangsa kredit investasi cenderung meningkat sedangkan pangsa konsumsi cenderung menurun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik 3.1, sbb:

**Grafik 3.1 Perkembangan Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan**



Dilihat dari aspek penyaluran kredit menurut sektor ekonomi, sektor yang mengalami pertumbuhan yang pesat adalah sektor industri, pertanian dan jasa sosial masyarakat sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan. Dilihat dari

pangsa kredit maka sektor industri pengolahan paling dominan kemudian diikuti sektor perdagangan, restoran, hotel serta pertanian.

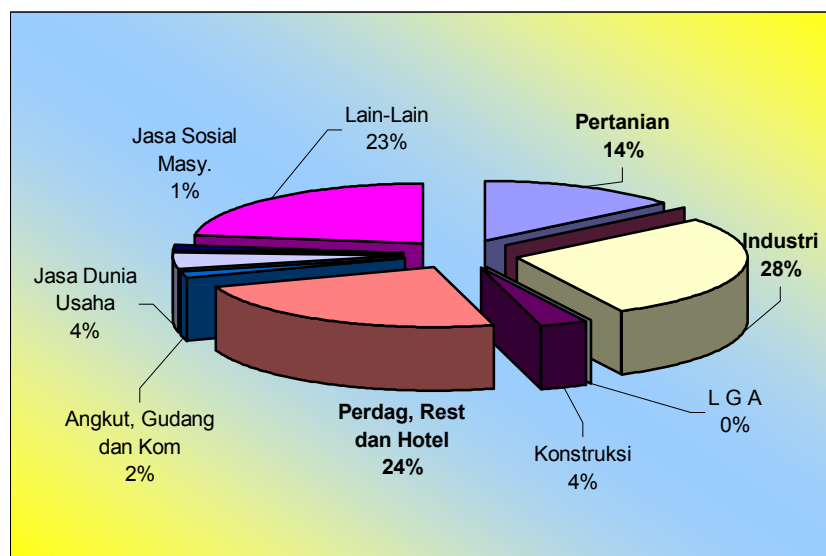
**Tabel 3.3 Perkembangan Kredit Menurut Sektor Ekonomi  
(Nominal dalam Triliun Rupiah)**

Indikator	2004	2005	2006		Pertumbuhan	
			Triw	Triw	2006	
			I	II	I	II
Pertanian	1.00	4.85	4.76	5.17	-1.86%	6.60%
- Share	3.81%	13.80%	13.46%	14.22%		
Pertanian	0.01	0.00	0.00	0.00		
- Share	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%		
Industri	7.23	9.44	10.01	10.23	6.04%	8.37%
- Share	27.54%	26.86%	28.30%	28.14%		
Listrik, gas dan air minum	0.01	0.00	0.00	0.00		
- Share	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%		
Konstruksi	0.92	1.30	1.25	1.28	-3.85%	-1.54%
- Share	3.50%	3.70%	3.53%	3.52%		
Perdag, Rest dan Hotel	6.26	8.71	8.39	8.62	-3.67%	-1.03%
- Share	23.85%	24.79%	23.72%	23.71%		
Angkut, Gudang dan Kom	0.47	0.72	0.68	0.67	-5.56%	-6.94%
- Share	1.79%	2.05%	1.92%	1.84%		
Jasa Dunia Usaha	1.65	1.78	1.44	1.55	-19.10%	-12.92%
- Share	6.29%	5.07%	4.07%	4.26%		
Jasa Sosial Masy.	0.46	0.52	0.48	0.54	-7.69%	3.85%
- Share	1.75%	1.48%	1.36%	1.49%		
Lain-Lain	5.55	7.82	8.36	8.29	6.91%	6.01%
- Share	21.14%	22.25%	23.64%	22.81%		
<b>Total</b>	<b>26.25</b>	<b>35.14</b>	<b>35.37</b>	<b>36.35</b>	<b>0.65%</b>	<b>3.44%</b>

Dalam tiga tahun terakhir struktur penyaluran kredit didominasi oleh sektor industri dengan peningkatan yang cukup pesat.



Grafik 3.2 Pangsa Kredit Menurut Sektor Ekonomi Triwulan II-06



Selanjutnya dilihat dari penyaluran kredit kepada sektor UMKM, tampak peranan sektor UMKM cenderung berkembang cukup baik tercermin dari peningkatan pangsa UMKM terhadap total kredit semula 43,97% pada tahun 2005, naik menjadi 44,39% pada triwulan I/2006 serta meningkat menjadi 44,46% pada triwulan II/2006.

Tabel 3.4 Perkembangan UMKM (Nominal dalam Triliun Rupiah)

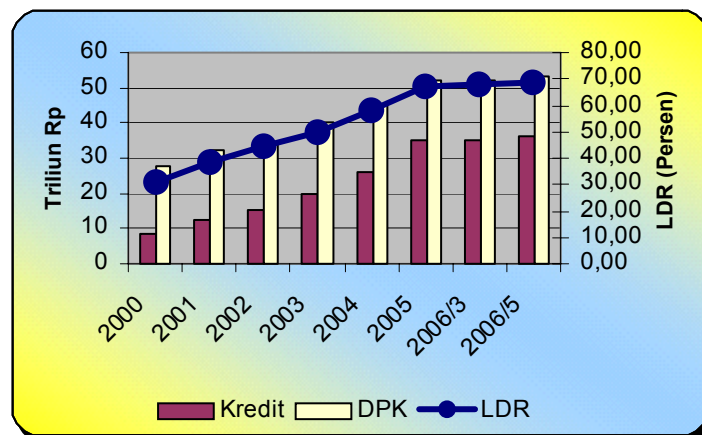
Indikator	2004	2005	2006		Pertumbuhan	
			Triw	Triw	2006	
			I	II	I	II
Pertanian	0.74	0.82	0.82	0.89	0.00%	8.54%
Pertambangan	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-
Industri	1.50	1.90	1.97	1.98	3.68%	4.21%
Listrik, gas dan air minum	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-
Konstruksi	0.55	0.68	0.64	0.65	-5.88%	-4.41%
Perdag, Rest dan Hotel	3.98	5.32	5.40	5.58	1.50%	4.89%
Angkut, Gudang dan Kom	0.41	0.51	0.49	0.46	-3.92%	-9.80%
Jasa Dunia Usaha	0.81	1.00	1.01	1.08	1.00%	8.00%
Jasa Sosial Masy.	0.18	0.25	0.27	0.29	8.00%	16.00%
Lain-Lain	3.78	4.96	5.07	5.22	2.22%	5.24%
<b>Total UMKM</b>	<b>11.96</b>	<b>15.45</b>	<b>15.70</b>	<b>16.16</b>	<b>1.62%</b>	<b>4.60%</b>

<b>Peranan thd tot. Kred.</b>	<b>45,56%</b>	<b>43,97%</b>	<b>44,39%</b>	<b>44,46%</b>	-	-
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---

Peningkatan sektor UMKM tersebut terutama disebabkan semakin giatnya pemberian kredit kepada sektor jasa-jasa dan sektor pertanian, industri dan perdagangan, restoran, hotel.

Secara umum fungsi intermediasi perbankan di wilayah Sumatera Utara cenderung meningkat namun akselerasinya semakin lambat. Hal ini terjadi akibat pertumbuhan kredit yang kurang ekspansif terutama disebabkan semakin menurunnya pertumbuhan kredit KMK sebagai motor penggerak kegiatan usaha. Perbandingan kredit yang disalurkan dengan kegiatan penghimpunan dana dapat dilihat pada grafik 3.3, dimana berdasarkan grafik tersebut tampak perkembangan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) relatif konstan sejak tahun 2005, begitu juga perkembangan pemberian kredit sehingga nisbah kredit terhadap DPK cenderung konstan. Perkembangan DPK yang kurang ekspansif terutama disebabkan semakin menurunnya tingkat suku bunga simpanan yaitu semula rata-rata 10,63% pada tahun 2005, turun menjadi 10,39% pada triwulan I/2006 dan kembali turun menjadi 10,33% sementara itu tingkat suku bunga kredit secara rata-rata cenderung meningkat yaitu semula 14,71% pada tahun 2005, naik menjadi 14,91% pada triwulan I/2006 dan kembali meningkat menjadi 10,89% pada triwulan II/2006.

Grafik 3.3 Perkembangan LDR, Kredit & DPK



### 3.1.3 Risiko Kredit

Walaupun fungsi intermediasi perbankan masih dapat meningkat yang tercermin dari meningkatnya LDR sampai dengan triwulan II/2006, namun dari aspek kualitas perkreditan cenderung semakin mengalami penurunan. Tekanan risiko kredit pada triwulan II/2006 cenderung meningkat akibat dari meningkatnya NPL kelompok bank pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II/2006 pangsa NPL kelompok bank pemerintah sangat dominan yaitu tercatat sebesar 91,05% sedangkan kelompok bank lainnya belum signifikan mempengaruhi NPL. Dari tahun ke tahun NPL kelompok bank tersebut cenderung meningkat sehingga secara total sangat kuat mempengaruhi kinerja NPL di wilayah Sumatera Utara.

Tabel 3.5 Perkembangan NPL Kelompok Bank  
(Nominal dalam Triliun Rupiah)

NPL Grup Bank	2004	2005	2006		Pertumbuhan	
			Triw	Triw	2006	
			I	II	I	II
B. Pemerintah	0.70	3.01	3.06	3.56	1.66%	18.27%
- Share	88.61 %	91.49 %	90.80%	91.05%		
B. Swasta Nasional Devisa	0.08	0.18	0.28	0.31	55.56%	72.22%
- Share	10.13 %	5.47%	8.31%	7.93%		
B. Swasta Non Devisa	0.01	0.10	0.03	0.04	-	-
- Share	1.27%	3.04%	0.89%	1.02%	70.00 %	60.00 %
B. Asing dan Campuran	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
- Share	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>	<b>0.79</b>	<b>3.29</b>	<b>3.37</b>	<b>3.91</b>	<b>2.43%</b>	<b>18.84%</b>

Dilihat dari sektor ekonomi maka sektor yang dominan mempengaruhi besarnya NPL perbankan di wilayah Sumut adalah sektor industri pengolahan.

Sementara itu NPL untuk sektor UMKM sampai dengan triwulan II/2006 tercatat sebesar Rp0,84 triliun naik sebesar 37,70% dibandingkan tahun 2005. Pangsa NPL UMKM terhadap kredit keseluruhan sebesar 2,31% meningkat sebesar

33,12% dibandingkan dengan pangsa NPL UMKM tahun 2005 yang mencapai 2,01%.

**Tabel 3.6 Perkembangan NPL Menurut Sektor Ekonomi  
(Nominal dalam Triliun Rupiah)**

NPL Sek. Ekonomi	2004	2005	Nominal		Pertumbuhan	
			2006		2006	
			I	II	I	II
Pertanian	0.13	0.56	0.64	0.79	14.29%	41.07%
Pertambangan	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	0.42	2.10	2.03	2.25	-3.33%	7.14%
Listrik, Gas & Air	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	0.04	0.20	0.19	0.19	-5.00%	-5.00%
Perdag, Rest dan Hotel	0.09	0.20	0.22	0.32	10.00%	60.00%
Angkut, Gudang & Kom	0.01	0.01	0.02	0.04	100.00%	300.00%
Jasa Dunia Usaha	0.01	0.05	0.05	0.06	0.00%	20.00%
Jasa Sosial Masy.	-	0.01	0.02	0.02	100.00%	100.00%
Lain-Lain	0.08	0.15	0.20	0.24	33.33%	60.00%
Total NPL Seluruh Kredit	0.79	3.29	3.37	3.91	2.43%	18.84%
Total NPL UMKM	0.31	0.61	0.71	0.84	16.39%	37.70%
Jumlah Kredit	26.25	35.14	35.37	36.35	0.65%	3.44%
% NPL Seluruh Bank	3.01%	9.36%	9.53%	10.76%		
% NPL UMKM	1.18%	1.74%	2.01%	2.31%		

### 3.1.3.1 Risiko Pasar

Risiko pasar akibat tekanan suku bunga kredit masih cukup tinggi tercermin dari masih tingginya tingkat *undisbursement loan* yaitu sampai dengan triwulan II/2006 tercatat sebesar Rp.6,05 triliun meningkat sebesar 3,27% dibandingkan

posisi tahun 2005 sebesar Rp5,86 triliun. Risiko pasar akibat perubahan nilai tukar relatif nihil karena simpanan dalam valas nihil.

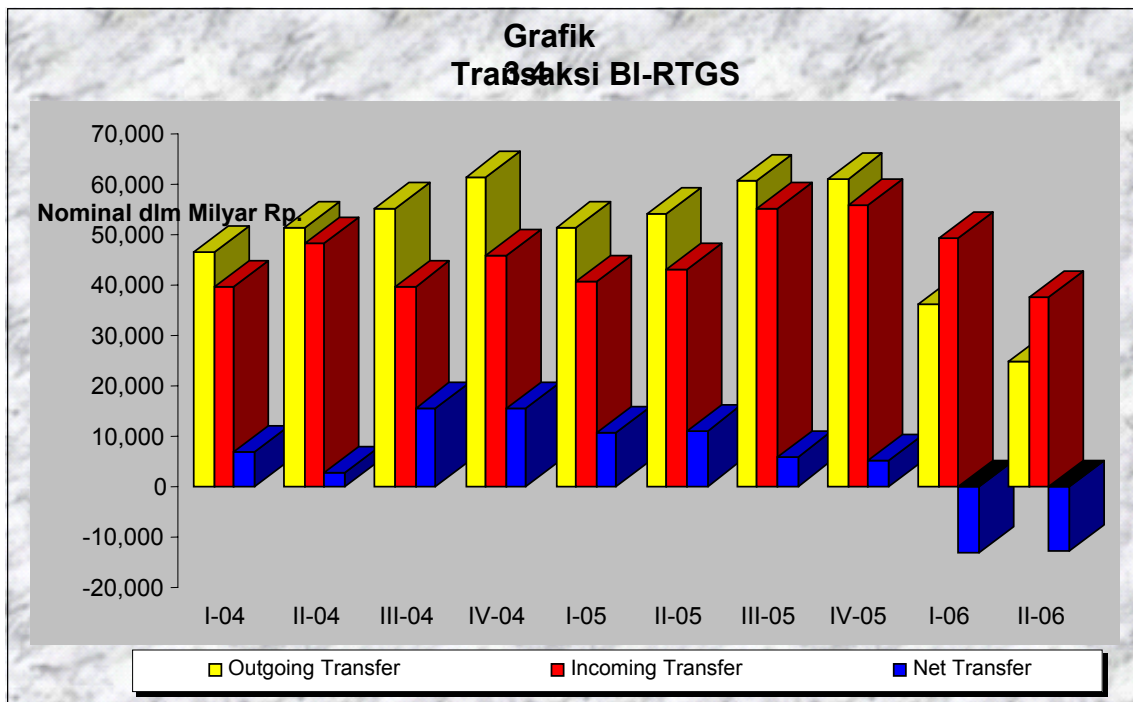
### **3.1.3.2 Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas perbankan masih relatif aman tercermin dari tingkat rasio likuiditas sebesar 7,61% sampai dengan triwulan II tahun 2006 sedangkan pada triwulan I/2006 tercatat sebesar 6,72% dan pada tahun 2005 sebesar 4,48%.

### 3.2 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

#### 3.2.1 Kegiatan Transaksi BI-RTGS Perbankan Sumatera Utara

Perkembangan transaksi BI-RTGS melalui perbankan yang ada di wilayah Sumatera Utara pada periode triwulan II tahun 2006 mencapai Rp.24.981 milyar untuk transfer keluar (*Outgoing Transfer*) atau **lebih kecil** dari transfer masuk (*Incoming Transfer*) yang mencapai Rp.37.727 milyar, sehingga terdapat *Net Income Transfer* atau transfer masuk bersih ke sistem perbankan di Wilayah Sumatera Utara yang mencapai Rp.12.746 milyar atau turun sebesar 2,66 % bila dibanding periode triwulan I tahun 2006 yang mencapai Rp.13.094 milyar. Masuknya aliran dana ke sistem perbankan Sumatera Utara, mengindikasikan meningkatnya kegiatan ekonomi di Sumatera Utara, yang pada gilirannya mendorong transaksi perdagangan dan perekonomian antar wilayah. Gambaran perkembangan transaksi (Grafik 1).



Dilihat dari volume transaksi, baik transaksi keluar dan transaksi masuk masing-masing mengalami penurunan sebesar 8.484 dan 4.432 atau masing-masing turun 18,2% dan 9,3%. Dari sisi nilai nominal transaksi keluar dan transaksi masuk, masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp.11.285 milyar dan Rp.11.633 milyar atau masing-masing turun sebesar 31,1% dan 23,6%.

Tabel 3.7  
**STATISTIK TRANSAKSI BI-RTGS**

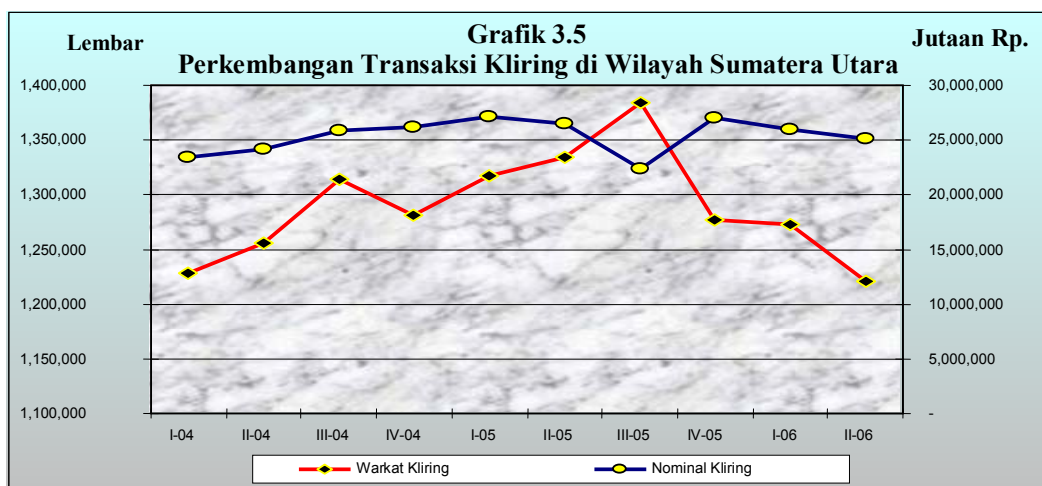
Nominal dalam Milyar Rp

Triwl.	OUTGOING		INCOMING		NET TRANSFER		Growth Transaksi RTGS
	Volume Transaksi	Nominal Transaksi	Volume Transaksi	Nominal Transaksi	Volume Transaksi	Nominal Transaksi	
I-04	39,353	46,462	28,645	39,678	10,708	6,784	
II-04	46,611	51,256	33,314	48,468	13,297	2,788	-58.9
III-04	52,138	55,263	37,076	39,597	15,062	15,666	461.9
IV-04	52,960	61,418	38,836	45,786	14,124	15,632	-0.2
I-05	48,362	51,285	38,676	40,608	9,686	10,677	-31.7
II-05	52,401	54,178	43,153	43,273	9,248	10,905	2.1
III-05	60,827	60,853	51,351	55,085	9,476	5,768	-47.1
IV-05	59,863	61,160	50,361	55,926	9,502	5,234	-9.2
I-06	46,703	36,266	47,430	49,360	(727)	-13,094	-350.1
II-06	38,219	24,981	42,998	37,727	(4,779)	-12,746	-2.6
<b>TOTAL</b>	<b>497,437</b>	<b>503,122</b>	<b>411,840</b>	<b>455,508</b>	<b>85,597</b>	<b>47,614</b>	

### 3.2.2 Perkembangan Kliring

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan perbankan dalam mewujudkan penyelenggaraan kliring dan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia telah menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dimana pada tahap awal telah diimplementasikan pada penyelenggaraan kliring di wilayah Jakarta, menyusul KBI Bandung dan KBI Surabaya.

Pada tanggal 27 Juni 2006 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) resmi diimplementasikan di wilayah kliring KBI Medan dan tanggal 3 Juli 2006 di KBI Sibolga.



Perkembangan transaksi kliring diwilayah Sumatera Utara pada triwulan II-2006 menunjukkan penurunan baik dari sisi jumlah warkat maupun dari sisi nilai nominal kliring. Jumlah warkat kliring pada triwulan II-2006 sebesar 1,220,680 lembar, turun (4,1%) atau sebesar 52.627 lembar, bila dibanding dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 1,273,307 lembar. Dari sisi jumlah nominal warkat pada triwulan II-2006 tercatat sebesar Rp.25.164 milyar, mengalami penurunan 3,2% atau sebesar Rp.842 milyar bila dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp.26.007 milyar.

**Tabel 3.8. STATISTIK PERPUTARAN KLIRING SUMATERA UTARA**  
**Periode Januari 2004 s/d. Juni 2006**

**Milyar Rp.**

Triwl.	KLIRING PENYERAHAN				CEK & BILYET GIRO KOSONG				Ratio Cek/BG Rasio Cek/BG Kosong thd. Klrg. Penyerahan	
	JUMLAH		Growth (%)		JUMLAH		Growth (%)		Lbr	Nom.
	Lbr	Nom.	Lbr	Nom.	Lbr	Nom.	Lbr	Nom.		
I-04	1,228,775	23,461	0.0	0.0	8,293	107	-	-	0.67	0.46
II-04	1,255,785	24,132	2.2	2.9	8,128	98	-2.0	-8.0	0.65	0.41
III-04	1,314,589	25,835	4.7	7.1	7,776	89	-4.3	-9.2	0.59	0.35
IV-04	1,281,121	26,194	-2.5	1.4	8,335	114	7.2	27.1	0.65	0.43
I-05	1,317,175	27,171	2.8	3.7	8,400	107	0.8	-6.2	0.64	0.39
II-05	1,334,748	26,545	1.3	-2.3	10,141	140	20.7	31.1	0.76	0.53
III-05	1,384,592	22,346	3.7	-15.8	9,970	156	-1.7	11.6	0.72	0.7
IV-05	1,277,015	27,040	-7.8	21.0	9,945	147	-0.3	-5.8	0.78	0.54
I-06	1,273,307	26,007	-0.3	-3.8	10,437	162	5.0	10.2	0.82	0.62
II-06	1,220,680	25,164	-4.1	-3.2	10,242	176	-1.9	9.0	0.84	0.7

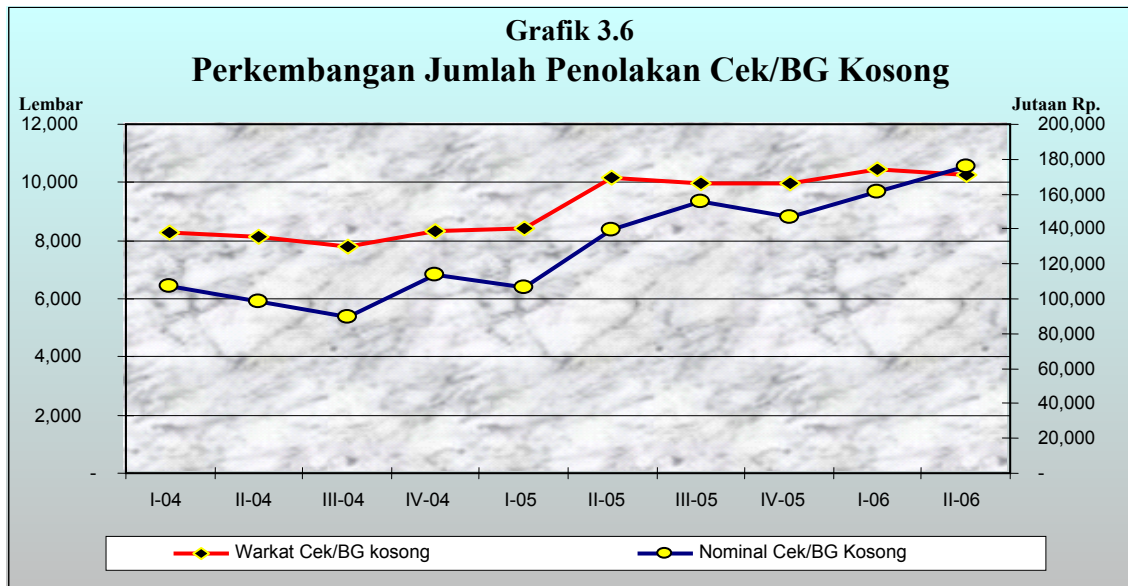
Nb. Kliring di wilayah Sumatera Utara meliputi 8 (delapan) Penyelenggara Kliring Lokal.

al.: Kliring Lokal Medan, Tebing Tinggi, Kabanjahe, Pematang Siantar, Kisaran, R. Prapat  
Pdg.Sidempuan, Sibolga.

Sementara itu, jumlah nominal penolakan Cek dan Bilyet Giro Kosong di wilayah Sumatera Utara sampai dengan triwulan II tahun 2006 mengalami peningkatan 9% atau Rp.14.483, dari Rp.161.664 juta pada triwulan I menjadi sebesar Rp.176.147 juta pada triwulan II-2006. Dari sisi jumlah warkat Cek/BG



Kosong mengalami penurunan namun relative masih kecil sebesar 1,9% atau 195 lembar, dari 10.437 lembar pada triwulan I-06 menjadi 10.242 pada triwulan II-06.



Meningkatnya jumlah Cek/BG Kosong dipengaruhi oleh hal-hal berikut :

- Bank tidak menutup rekening nasabah yang telah mendapat Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) atau yang telah masuk Daftar Hitam, yang terindikasi dari warkat-warkat tolakan nasabah tersebut masih ditolak dengan alasan Saldo Tidak Cukup.
- Nasabah yang telah masuk dalam Daftar Hitam dapat membuka rekening giro pada bank lainnya.
- Bank tidak menarik kembali giro bank yang telah diberikan kepada nasabah, setelah nasabah tersebut masuk dalam Daftar Hitam.

### 3.2.3 Perkembangan Inflow dan Outflow Perkasan di Wilayah Sumatera Utara

Aliran uang masuk (*Inflow*) di wilayah Sumatera Utara (KBI Medan dan KBI Sibolga) pada periode triwulan II tahun 2006 tercatat sebesar Rp.5.618.341 juta, sementara aliran uang keluar (*Outflow*) tercatat sebesar Rp.5.229.137 juta, sehingga terjadi **Net Inflow** pada aliran kas sebesar Rp. 389,204 juta.

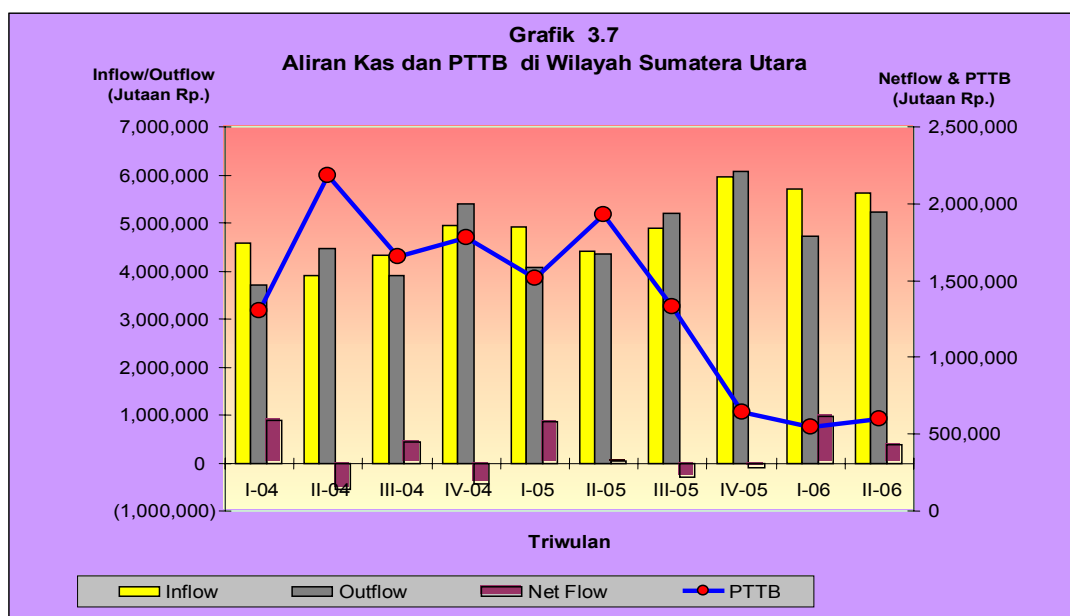
Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, *Inflow* pada triwulan II-2006 tercatat turun sebesar 1,30% atau sebesar Rp.74.270 juta, dari Rp.5.692.611 juta pada triwulan I-2006 menjadi Rp.5.618.341. Namun aliran uang keluar atau

Outflow mengalami peningkatan sebesar 10,91% atau Rp.514.288 juta, dari Rp.4.714.849 pada triwulan I-2006 menjadi Rp.5.229.137 pada triwulan II-2006.

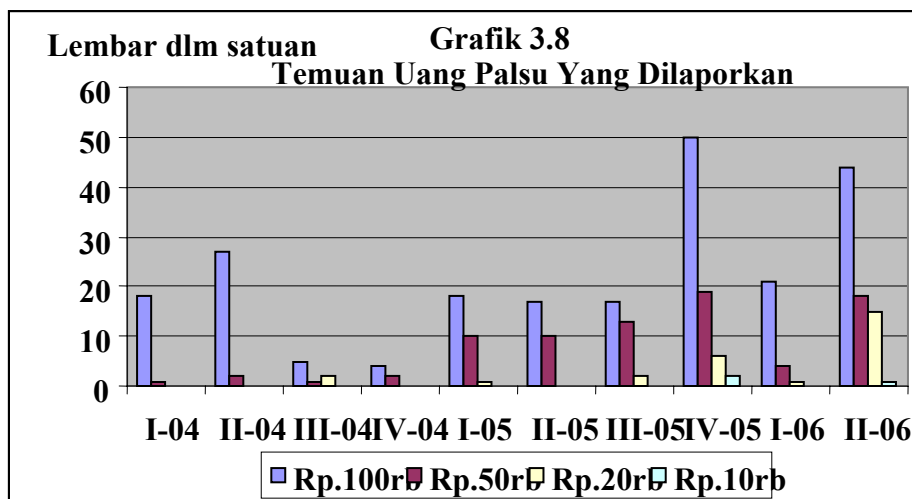
**Tabel 3.9**  
**DATA ALIRAN UANG dan PTTB DI WILAYAH SUMATERA UTARA**  
**Periode Januari 2004 s/d. Juni 2006**

TRIW	ALIRAN KAS			PTTB	
	INFLOW	OUTFLOW	NET FLOW	TOTAL	RATIO PTTB
					%
<b>I-04</b>	4,581,849	3,694,779	887,070	1,307,038	28.53
<b>II-04</b>	3,913,451	4,460,398	(546,947)	2,184,444	55.82
<b>III-04</b>	4,330,782	3,899,339	431,443	1,650,915	38.12
<b>IV-04</b>	4,955,770	5,390,270	(434,500)	1,779,897	35.92
<b>I-05</b>	4,903,345	4,056,796	846,549	1,511,345	30.82
<b>II-05</b>	4,418,153	4,365,735	52,418	1,923,988	43.55
<b>III-05</b>	4,891,310	5,183,762	(292,452)	1,330,735	27.21
<b>IV-05</b>	5,968,439	6,062,269	(93,830)	646,276	10.83
<b>I-06</b>	5,692,611	4,714,849	977,762	545,257	9.58
<b>II-06</b>	5,618,341	5,229,137	389,204	596,738	10.62
<b>TOTAL</b>	<b>49,274,051</b>	<b>47,057,334</b>	<b>2,216,717</b>	<b>13,476,633</b>	<b>27.35</b>

Meliputi wilayah kerja KBI Medan dan KBI Sibolga  
 PTTB = (Pemberian Tanda Tidak Berharga)



### 3.2.4 Temuan Uang Palsu



**Tabel 3.10**  
**Temuan Uang Palsu Yang Dilaporkan**

JENIS PECAHAN AN	TAHUN 2004				TAHUN 2005				TAHUN 2006	
	I-04	II-04	III-04	IV-04	I-05	II-05	III-05	IV-05	I-06	II-06
Rp.100rb	18	27	5	4	18	17	17	50	21	44
Rp.50rb	1	2	1	2	10	10	13	19	4	18
Rp.20rb	0	0	2	0	1	0	2	6	1	15
Rp.10rb	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
Lembar	19	29	8	6	29	27	32	77	26	78
Nominal	1,850	2,800	590	500	2,320	2,200	2,390	6,090	2,320	5,615

**ribuan Rp.**

Selama periode triwulan II tahun 2006, jumlah uang palsu yang dilaporkan ke KBI Medan baik yang berasal dari bank, laporan langsung dari masyarakat maupun setoran bank-bank tercatat sebanyak 78 bilyet dengan nilai total nominal sebesar Rp.5.615.000,00 atau meningkat bila dibanding temuan uang palsu pada

periode triwulan sebelumnya sebanyak 26 bilyet dengan nilai nominal sebesar Rp.2.320.000,00.

Jenis pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan dan dilaporkan adalah pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 44 bilyet, pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 18 bilyet, pecahan Rp.20.000,00 sebanyak 15 bilyet. Sementara itu dari KBI Sibolga tidak ditemukan adanya uang palsu pada periode laporan.

Seiring dengan terjadinya peningkatan temuan uang palsu, KBI Medan tetap berupaya untuk melakukan upaya penanggulangan beredarnya uang palsu di wilayah Sumatera Utara, baik preventif maupun represif. Langkah preventif dimaksud antara lain meningkatkan pemahaman masyarakat dengan melakukan Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, pegawai negeri, kepolisian serta penyebaran informasi kepada perbankan di wilayah Sumatera Utara. Pada triwulan II-2006 telah dilakukan sosialisasi di P. Siantar, Sidikalang, Rantau Prapat dan Kabanjahe.

Upaya represif yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian di Sumatera Utara dan dengan instansi terkait lainnya seperti pengadilan dan kejaksaan.

### **3.2.5 Penyediaan Uang Yang Layak Edar**

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mencetak dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang kartal baik dari jumlah maupun kualitas. Untuk menjaga kelayakan uang yang diedarkan, Bank Indonesia secara periodik dan berkesinambungan melakukan pemusnahan atau Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) terhadap uang yang tidak layak edar (lusuh/rusak) dan emisi yang telah ditarik dari peredaran dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat akan jenis dan pecahan uang kartal.

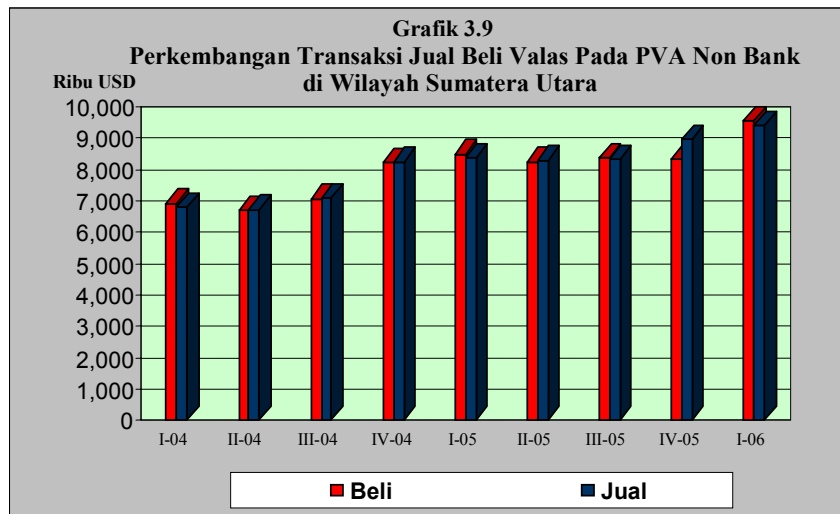
Pada triwulan II-2006 jumlah pemusnahan uang yang tidak layak edar mengalami peningkatan meskipun menunjukkan kecenderungan yang menurun. Jumlah pemusnahan uang yang dilakukan pada triwulan II-2006 tercatat sebesar Rp.596.738 juta atau 10,62% dari jumlah uang kartal yang masuk (Inflow) sebesar Rp. 5,618,341 juta. Jumlah uang kartal yang dimusnahkan tersebut, meningkat 9,44% bila dibanding dengan periode triwulan I-2006 yang tercatat sebesar Rp.545.257 juta.

Perkembangan jumlah uang yang dimusnahkan hingga triwulan II-2006 menunjukkan trend yang menurun (Tabel 1). Hal ini terkait dengan kebijakan Bank Indonesia untuk melonggarkan tingkat kesegaran uang yang diedarkan kembali ke masyarakat dengan tetap memperhatikan clean money policy.

### 3.2.6 Transaksi Jual Beli UKA dan TC Pada PVA Non Bank

Perkembangan transaksi penjualan dan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) dan *Travel Check* (TC) melalui Pedagang Valuta Asing (PVA) Non Bank di wilayah Sumatera Utara pada periode triwulan I-2006 mengalami peningkatan, baik jumlah penjualan maupun pembelian. Jumlah Pembelian UKA dan TC pada triwulan I sebesar US\$ 9.550 ribu, naik 14,38% atau sebesar US\$ 1.201 bila dibanding periode sebelumnya yang tercatat sebesar US\$ 8.349. Sementara jumlah Penjualan UKA dan TC pada triwulan I juga mengalami peningkatan 4,91% atau sebesar US\$ 439, dari US\$ 8.949 pada triwulan IV-05 menjadi US\$ 9.388 pada triwulan I-06.

Sampai dengan periode triwulan I tahun 2006, jumlah Pedagang Valuta Asing Non Bank di wilayah Sumatera Utara adalah sebanyak 39 PVA, yang berlokasi di kota Medan, Tanjung Balai dan Pematang Siantar.



## BOKS - 6 **PENINGKATAN PERAN UMKM TRIWULAN II TAHUN 2006**

Upaya pengembangan UMKM telah menjadi topik utama bagi berbagai pihak baik pemerintah dan swasta. Kendala keterbatasan dan akses ke sumber dana masih menjadi perhatian utama disamping kendala lainnya. Dalam rangka pemberdayaan sektor UMKM maka Bank Indonesia melakukan strategi pengembangan UMKM melalui empat kebijakan yaitu 1) kebijakan perkreditan, 2) pengembangan kelembagaan, 3) pemberian bantuan teknis dan 4) kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Terkait kendala kesulitan mengakses sumber modal, maka melalui program kebijakan pengembangan kelembagaan bagi sektor UMKM Bank Indonesia Medan telah memfasilitasi pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) melalui pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Momorandum of Understanding (MoU) pembentukan LPKD antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT. Askrido pada tanggal 17 Mei 2006 di Tarutung.

Pada tahap awal skim penjaminan kredit masih terbatas kepada sektor pertanian dan perdagangan. Fasilitas kredit yang diberikan maksimum sebesar Rp500 juta dengan jangka waktu bervariasi dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan besar biaya penjaminan yang ditanggung peminjam berkisar antara 1,2% sampai dengan 6,00% per tahun. Untuk tahap awal, Pemerintah Daerah Tapanuli Utara telah menyediakan dana penjaminan sebesar Rp1,4 Milyar dengan sumber dana dari APBD 2006 untuk kepentingan penjaminan sektor UMKM. Dengan dana penjaminan sebesar itu, diharapkan perbankan dapat menyalurkan kredit sebesar 5 kali dana penjaminan yang disediakan, dan dalam pemberiannya perbankan harus tetap mengacu kepada prinsip kelayakan usaha dan kehati-hatian perbankan.

Ditengah kondisi tingkat ekspansi kredit perbankan yang cenderung menurun, maka skim penjaminan kredit ini tampaknya merupakan salah satu solusi yang efektif mengatasi kendala rendahnya *financing* bagi UMKM. Kedepan diharapkan dengan pola penjaminan kredit yang diperluas secara intensif dan ekstensif di semua sektor unggulan dan wilayah akan mampu meningkatkan peran sektor UMKM dan intermediasi perbankan yang lebih baik. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah dengan meningkatnya sektor UMKM maka penerimaan PAD dapat ditingkatkan.

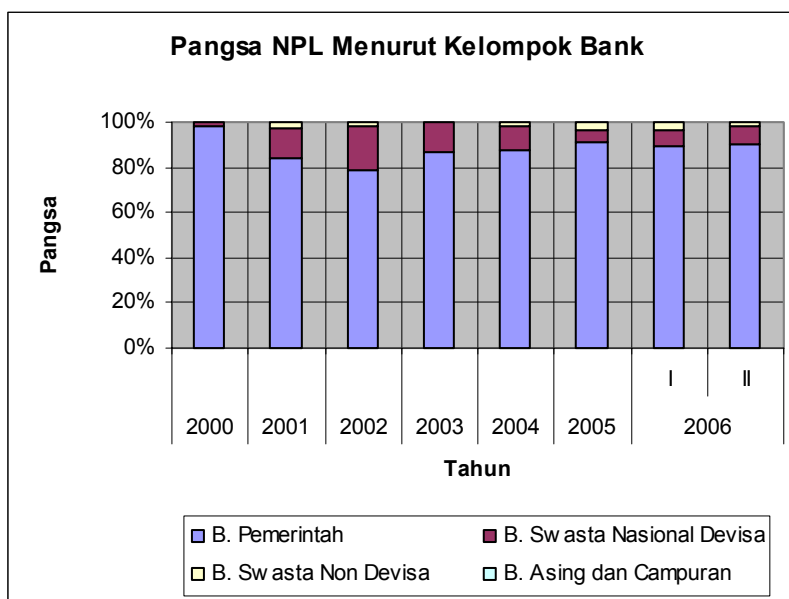
BOKS - 7  
**TINGGINYA NPL PERBANKAN**

Perkembangan ekspansi kredit perbankan sampai triwulan II/2006 tampaknya cenderung melambat yaitu hanya mencatat sebesar 5,41%, sedangkan selama tahun 2005 kredit perbankan mampu tumbuh sebesar 33,87%. Lambatnya pertumbuhan kredit tersebut dilihat dari kelompok bank terutama disebabkan melambatnya ekspansi kredit kelompok bank pemerintah yang tercermin dari penurunan pangsa sebesar minus 0,24%, padahal total kredit meningkat.

**Pangsa Kredit Kelompok Bank**  
(Nominal Dalam triliun Rupiah)

Group Bank	Kredit		Pangsa	
	2005	2006	2005	2006
Bank Pemerintah	18.3	19.2	52.14%	51.89%
Bank Swasta Nas. Devisa	12.7	13.4	36.18%	36.22%
Bank Swas Nas. Non Devisa	2	2.1	5.70%	5.68%
Bank Asing & Campuran	2.1	2.3	5.98%	6.22%
<b>Total</b>	<b>35.1</b>	<b>37</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Kelompok bank lainnya kecuali bank asing dan campuran cenderung meningkat. Dilihat dari penyebaran NPL menurut kelompok bank ternyata



sebagian besar NPL perbankan Sumut berasal dari kelompok bank pemerintah. Permasalahan NPL kelompok bank ini sudah cukup lama berlangsung dan sampai saat ini belum tampak adanya perbaikan yang signifikan. Mengingat permasalahan NPL

kelompok bank ini sangat structural tampaknya perlu diupakan angkah-langkah perbaikan yang konkrit sehingga kinerja perkreditan perbankan wilayah Sumut dapat kembali sehat. Beberapa upaya penyehatan kredit dapat berupa penghapusan kredit macet yang merupakan komponen terbesar NPL kelompok bank tersebut, peningkatkan penagihan kredit non performing secara intensif.



## BOKS - 8

### **SISTEM KLIRING NASIONAL DI KANTOR BANK INDONESIA MEDAN**

Mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran, merupakan salah satu tugas pokok Bank Indonesia dalam mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Terkait pelaksanaan tugas dimaksud, pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang saat ini, merupakan suatu keharusan bagi Bank Indonesia sebagai regulator kebijakan sistem pembayaran nasional dan perbankan, dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor peningkatan volume warkat transaksi kliring yang meningkat menyebabkan biaya pencetakan warkat meningkat, prosedur pemrosesan warkat yang memerlukan waktu proses yang lebih lama, keragaman sistem kliring yang digunakan saat ini (Sistem Kliring Manual, Semi Otomasi, Otomasi, Elektronik), dan keterbatasan cakupan wilayah dalam pelaksanaan transfer kredit antar bank masih bersifat lokal.

Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang handal dengan berbasis teknologi informasi khususnya transfer dana antar bank atau kliring, Bank Indonesia menerapkan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dampak dari penerapan SKNBI ini antara lain :

1. Mengakomodir transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*Paperless* Nota Kredit), sehingga lebih efisien, cepat, aman dan handal.
2. Mengurangi risiko Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring, dengan diterapkannya "*Failure to Settle (FtS)*" dalam mekanisme penyelesaian akhir hasil kliring berdasarkan perhitungan hasil kliring secara nasional dari seluruh wilayah kliring, yang mewajibkan bank untuk menyediakan *prefund* pada setiap awal hari sebelum kliring debit dan kliring kredit dimulai.

Mengingat SKNBI akan menggantikan sistem kliring yang saat ini digunakan di 105 penyelenggara kliring di Indonesia, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap. Implementasi SKN, untuk tahap awal SKNBI diterapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005, kemudian Bandung. Tahap kedua (Juli s/d. Desember 2005) pada Penyelenggara Kliring Lokal Non-BI di Wilayah Jawa Barat. Selanjutnya direncanakan sampai dengan tahun 2007 seluruh Kantor Bank Indonesia (KBI) dan Penyelenggara Kliring Non-BI.

Penerapan SKNBI di Wilayah Kliring KBI Medan telah di Implementasi pada tanggal 27 Juni 2006 dan di Wilayah Kliring KBI Sibolga pada tanggal 3 Juli 2006.

Sejak diimplementasikannya SKNBI di Wilayah Kliring KBI Medan, proses perhitungan hasil kliring dapat dilaksanakan secara cepat dan lebih efisien. Hal ini dirasakan manfaatnya oleh peserta kliring dimana hasil perhitungan kliring dapat diperoleh lebih awal.

## **PERUBAHAN POKOK DALAM PENYELENGGARAAN KLIRING**

### **Sistem Kliring :**

- ✓ Sebelum SKNBI :
  - Proses Kliring secara Manual, SOKL, Otomasi dan Elektronik.
  - Terintegrasi antara Kliring Debet dengan Kliring Kredit (*Paperbased*).
- ✓ Setelah SKNBI :
  - Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
  - Dipisahkan atas Kliring Kredit (*Paperless*) dan Kliring Debet (*Paperbased*).

### **Perhitungan Kliring :**

- ✓ Sebelum SKNBI :
  - Per Wilayah Kliring yang merupakan gabungan transaksi debet dan kredit.
- ✓ Setelah SKNBI :
  - Kliring Debet Per Wilayah Kliring
  - Kredit secara Nasional

### **Mekanisme Settlement :**

- ✓ Sebelum SKNBI :
  - Settlement dilakukan berdasarkan hasil perhitungan transaksi debet dan kredit gabungan.
  - Oleh masing-masing Wilayah Kliring (105 penyelenggara kliring).
- ✓ Setelah SKNBI :
  - Settlement untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit dilaksanakan secara terpisah.
  - Settlement Kliring Debet :
    - Hanya satu kali settlement
    - Berdasarkan BSK Debet Nasional yang merupakan gabungan dari BSK Debet Lokal.
  - Settlement Kliring Kredit :
    - Dimungkinkan lebih dari satu kali settlement.
    - Berdasarkan BSK Kredit Nasional.

# PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH DAN INFLASI

### 4.1 Prospek Ekonomi

- Setelah mengalami kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan I tahun 2006 yang lalu, aktivitas ekonomi Sumut mulai kembali bergairah dengan laju pertumbuhan pada triwulan II (yoy) yang bergerak naik. Perkembangan yang positif tersebut diharapkan dapat menjadi momentum awal percepatan pertumbuhan yang diharapkan hingga akhir tahun 2006 yakni sebesar 6,2% untuk nasional dan 6,49%<sup>5</sup> untuk provinsi Sumatera Utara.
- Satu catatan yang sangat penting menginjak triwulan III mendatang adalah pentingnya mendorong beberapa sektor yang selama ini menjadi andalan kinerja perekonomian pada semester II, yakni sektor industri, bangunan dan perdagangan. Sementara pada sektor pertanian pertumbuhan yang positif dapat terjadi sebagai bagian dari pola siklus musiman akibat proses panen tanaman bahan makanan di beberapa daerah lumbung padi serta produktivitas sub sektor perkebunan.

**Tabel - 4.1 Pertumbuhan PDRB Sumut Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (% , y-o-y)**

LAPANGAN USAHA	Tahun 2005				2006	
	Triw. I	Triw. II	Triw. III	Triw. IV	Triw.I	Triw.II
1. PERTANIAN	-0,27	1,25	-2,68	6,59	-3,22	2,85
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	-0,75	3,36	5,53	1,77	1,02	1,10
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,59	4,84	6,78	2,30	4,24	2,37
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	6,93	-0,45	-4,38	-2,64	-0,17	0,24
5. B A N G U N A N	35,73	26,07	14,84	-2,19	-2,08	-1,55
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN REST.	17,08	8,25	7,23	4,90	5,01	10,71
7. PENGANGKUTAN DAN KOM.	10,10	8,55	8,64	8,46	8,87	7,28
8. KEUANGAN, & JASA PERSH.	7,54	5,99	4,95	5,91	8,02	12,57
9. JASA - JASA	2,04	3,20	5,57	6,15	9,73	14,08
<b>P D R B</b>	<b>7,33</b>	<b>5,61</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>2,89</b>	<b>5,70</b>

Sumber : Survei Indikator Ekonomi, kerja sama BI dan BPS-SU

- Dengan membaiknya trend pertumbuhan ekonomi pada triwulan II (yoy), kita dapat berharap bahwa prospek perekonomian Sumut dapat kembali

<sup>5</sup> Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (BappedaSu)

menemukan momentumnya. Prospek perekonomian Sumut pada periode triwulan III-2006 mendatang diperkirakan bergerak positif. Berdasarkan perkembangan produksi sektoral, sebagian besar sektor usaha akan kembali mengalami peningkatan produksi dengan pertumbuhan yang cukup baik. Produktivitas sektor pertanian yang cukup terpuruk pada triwulan II akan kembali meningkat sebagai akibat musim panen raya di beberapa lumbung padi di provinsi Sumatera Utara. Imbasnya, beberapa sub sektor industri yang berbasis bahan makanan dan pengolahan bahan makanan akan kembali naik. Sementara sub sektor industri pengolahan yang berbasis tekstil dan bahan tekstil serta kayu-kayuan diperkirakan masih akan bergerak negatif.

- ✚ Triwulan III mendatang juga diharapkan dapat menjadi titik balik sektor bangunan yang sempat terhempas pada triwulan IV tahun 2005 hingga triwulan I yang lalu, meskipun menjadi primadona yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun belakangan ini. *Dari sisi keuangan pemerintah, minimnya realisasi anggaran pembangunan pada semester I akan mendorong percepatan anggaran publik yang pada akhirnya dapat mendorong aktivitas ekonomi secara luas.*

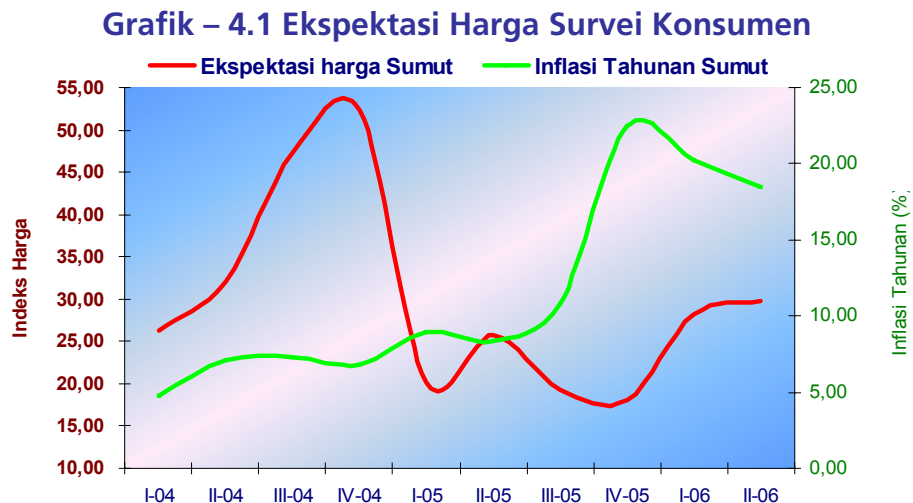
#### 4.2 Prospek Inflasi

- ✚ Metode **Analytic Network Process (ANP)** menunjukkan inflasi Sumatera Utara pada triwulan mendatang akan sedikit meningkat, namun tetap pada kisaran yang cukup stabil dengan semakin berkurangnya dominasi inflasi inti sebagai kontributor utama tekanan inflasi. Inflasi *administered price* yang pada triwulan II sedikit meningkat diperkirakan akan bergerak stabil mengingat belum adanya rencana pemerintah untuk menaikkan komoditi tertentu. Dengan kondisi tersebut, proyeksi inflasi Sumatera Utara triwulan III diperkirakan lebih tinggi dari triwulan II dengan kisaran  $1 \pm 0,25\%$ .
- ✚ Tekanan inflasi triwulan mendatang diperkirakan berasal dari kelompok barang perumahan serta pendidikan dan kesehatan. Kelompok perumahan masih dipicu tingginya permintaan bahan bangunan, sementara kelompok barang pendidikan dan kesehatan dipicu oleh siklus musiman musim ajaran baru di bulan Juli-Agustus. Pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih relatif volatile, namun

dengan tingkat yang cukup rendah. Beberapa faktor eksternal dapat mengancam kestabilan rupiah diperkirakan terkait dengan lonjakan harga minyak dunia yang terancam di atas US\$80 /barrel pasca konflik Israel-Libanon. Pelemahan rupiah yang diakibatkan faktor eksternal tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan komoditi impor (*imported inflation*).

✚ **Dari sisi fundamental**, tekanan inflasi yang terus menurun hingga triwulan II diperkirakan akan sedikit mengalami tekanan yang diimbangi dengan pelemahan tipis pada ekspektasi masyarakat. *Di satu sisi masyarakat akan sedikit cemas bahwa dampak kenaikan harga pupuk dan BBM untuk industri akan kembali mendorong biaya produksi yang terkait dengan produk primer pertanian dan sektor industri yang sangat tergantung pada bahan bakar. Sedangkan di sisi lain penurunan BI Rate yang mulai terjadi pada triwulan II dan akan terus berlanjut diperkirakan akan mendorong ekspansi ekonomi yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan barang, meskipun dengan tingkat kenaikan yang relatif kecil.*

Perkembangan ekspektasi konsumen terhadap tingkat harga dapat dilihat pada grafik 4.1 di bawah ini:



## Rekomendasi Kebijakan

Hingga paruh tahun 2006, beberapa indikator makro ekonomi provinsi Sumatera Utara relatif stabil, meskipun belum mampu mendorong pergerakan perekonomian secara signifikan. Kinerja yang cukup baik mampu ditunjukkan oleh perkembangan harga yang relatif stabil sepanjang semester I dengan mencatat akumulasi inflasi (Januari-Juni) sebesar 1,49%, lebih baik dari inflasi nasional yang sebesar 2,87%. Kondisi tersebut semakin menggembirakan jika kita melihat bahwa provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kontributor terbesar inflasi nasional pada tahun 2005.

Namun relatif stabilnya indikator harga tersebut belum mampu dioptimalkan oleh sektor riil untuk bergerak. Dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005 masih cukup dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang ditandai oleh rendahnya daya beli dan belanja masyarakat. Hal tersebut masih ditambah lagi dengan minimnya realisasi investasi hingga belum tersalurnya anggaran belanja publik yang tidak saja berfungsi sebagai stimulator, namun juga katalisator pembangunan. Percepatan anggaran pembangunan merupakan momentum yang akan mendorong sektor usaha untuk bergerak di tengah-tengah keraguan terhadap situasi pasar yang masih banyak menunggu (*wait and see*).

Mencermati kondisi tersebut, beberapa upaya kongkrit yang perlu mendapat perhatian oleh semua pihak, khususnya pelaku ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi Sumatera Utara antara lain:

### **XVIII. Inflasi**

Determinan inflasi Provinsi Sumatera Utara pada semester I tahun 2006 secara umum dapat di bagi dalam beberapa klasifikasi besar, antara lain :

- ✚ Dari sisi penawaran, posisi Sumut sebagai penyedia kebutuhan pasokan bahan makanan dan kelompok barang lainnya di NAD relatif sudah berangsur normal dan tidak menimbulkan tekanan yang berisiko tinggi. Namun demikian, *construction booming* yang tengah berlangsung telah mendorong intensitas pembangunan fisik yang tinggi sehingga akan menimbulkan dampak kenaikan permintaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tidak langsung yang cukup dirasakan dan menjadi salah satu pemicu tekanan inflasi di Sumatera Utara adalah terhadap kelompok barang perumahan (bahan bangunan dan biaya sewa rumah).
- ✚ Pengalaman pada tahun 2005 telah membuktikan bahwa sensitifitas kelompok barang di provinsi Sumut relatif rentan, khususnya terhadap kenaikan harga yang terkait dengan komoditi *administered price* (kelompok barang yang

dipengaruhi kebijakan harga oleh pemerintah). Untuk menjaga momentum inflasi yang terkendali pada semester I perlu dilakukan pemantauan secara intensif terhadap kelompok barang yang dapat mendorong kenaikan inflasi *administered price*.

- ✚ Selain *administered price*, inflasi non inti lainnya yang merupakan sumber inflasi Sumut adalah inflasi *volatile food*. Dengan kontribusinya yang sangat besar, khususnya pada tanaman bahan makanan, pengendalian terhadap distribusi serta pasokan barang tersebut akan sangat penting dalam mengendalikan tingkat harga. Ketergantungan terhadap alam, kendala distribusi yang menjadi salah satu masalah fundamental di Sumut harus segera dibenahi mengingat kondisi kekeringan, kegagalan panen dan rusaknya fasilitas irigasi dapat menjadi pemicu terhadap gejolak harga kelompok barang tersebut. Sepanjang semester I, inflasi *volatile food* memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap inflasi Sumut.

## **XIX. Ekonomi**

Mencermati perkembangan investasi di Sumatera Utara hingga posisi triwulan II tahun 2006, beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian bersama antara lain:

1. Dengan kondisi belum optimalnya aktivitas perekonomian Sumut yang ditandai dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah pada triwulan I serta kontraksi yang terjadi pada triwulan II, perlu upaya serta koordinasi yang signifikan antar instansi dan lembaga terkait.
2. Sektor Pertanian perlu mendapat perhatian utama mengingat selain sebagai sumber utama produk daerah juga merupakan bahan pendukung bergeraknya sub sektor industri makanan yang merupakan andalan Sumut. Dengan demikian, kebijakan yang mendukung sektor pertanian seperti perbaikan irigasi, distribusi pupuk, dan proses peremajaan (*replanting*) komoditas unggulan akan membawa implikasi yang luas dan menciptakan *multiplier effect* pada sektor ekonomi lainnya.
3. Secara umum, potensi dunia usaha dan investasi di Sumut **tetap prospektif**, Besarnya potensi investasi Sumut tercermin dari terpilihnya Sumut sebagai salah satu lokasi investasi yang paling diminati. Namun kondisi tersebut belum diikuti oleh pembenahan iklim usaha secara optimal yang ditandai oleh rendahnya realisasi investasi selama semester I.
4. Pemerintah pusat melalui **Inpres No. 3 Tahun 2006** telah berupaya untuk memperkuat iklim investasi yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi, antara lain yang menyentuh aspek teknis di bidang kepabeanan, perpajakan, ketenagakerjaan, usaha kecil, menengah dan

koperasi hingga secara umum yang menyangkut penguatan kelembagaan pelayanan investasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan pusat. namun langkah-langkah tersebut belum dirasakan oleh para investor karena **lebih bersifat strategis dan pembenahan dalam jangka panjang, tanpa ditindaklanjuti oleh kebijakan kongkret di daerah yang justru menjadi kendala investasi** seperti :

- **Koordinasi perijinan investasi antara pusat dan daerah.** Lembaga investasi daerah relatif tidak mempunyai kewenangan prinsip terhadap ijin investasi, sementara seluruh data juga bersifat terpusat.
- Investor masih dihadapkan pada kompleksitas birokrasi dan belum memiliki kejelasan/kemudahan **one stop service** yang tersistematis pada satu pintu (paling tidak terdapat koordinasi skematis yang jelas terhadap proses investasi). Proses perizinan harus dilakukan dengan instansi yang berbeda.
- Perlu peninjauan terhadap praktek **Ekonomi Biaya Tinggi** oleh pemerintah seperti perda bermasalah, pajak dan retribusi yang berlebihan, dan praktek premanisme.
- Upaya Pemerintah daerah menghapuskan dan mengevaluasi beberapa perda di wilayah Provinsi maupun kabupaten/kota perlu terus dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan kejelasan regulasi yang mendorong iklim usaha yang kondusif. Beberapa contoh Perda yang telah dibatalkan antara lain yang terkait dengan retribusi sertifikasi mutu barang (No.4 Tahun 2003) dan penyelenggaraan mutu barang (No.7 Tahun 2002), serta masih banyak lagi perda lain yang telah dibatalkan. (kurang lebih 11 kabupaten/kota telah membatalkan beberapa perda yang dianggap telah mengurangi efisiensi iklim usaha yang kondusif).



## **LAMPIRAN**

**Halaman ini sengaja  
dikosongkan**

***This page is intentionally blank***